

SKRIPSI

**PENGARUH JUMLAH PENDUDUK DAN INFLASI
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI
PROVINSI ACEH**



Disusun Oleh:

**NURUL FITRI
NIM. 170604004**

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M / 1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Nurul Fitri

NIM : 170604004

Program Studi : Ilmu Ekonomi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiarisi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 9 Maret 2022

Yang Menyatakan,




Nurul Fitri

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**Pengaruh Jumlah penduduk dan Inflasi terhadap Penerimaan
Pajak Daerah di Provinsi Aceh**

Disusun Oleh:

Nurul Fitri
NIM. 170604004

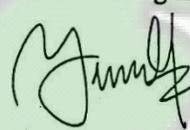
Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
Telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program Studi
Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I



Dr. Idaryani, SE., M.Si
NIDN. 0105057503

Pembimbing II



Yulindawati, SE., MM
NIP. 19790713 201411 2 002

Mengetahui,
Ketua Prodi,



Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si
NIP. 197204281999031005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Nurul Fitri
NIM : 170604004
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam
E-mail : 170604004@student.ar-raniry.ac.id

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi

Yang berjudul: **“Pengaruh Jumlah Penduduk dan Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Provinsi Aceh”**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 9 Maret 2022

Penulis
Mengetahui

Nurul Fitri
NIM.170604004

Pembimbing I

Dr. Idaryani, SE., M.Si
NIDN. 0105057503

Pembimbing II

Yulindawati, SE., MM
NIP. 197907132014112002

KATA PENGANTAR



Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberi nikmat, karunia, serta rahmat-Nya kepada seluruh makhluk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan proposal ini, yang berjudul “PENGARUH JUMLAH PENDUDUK DAN INFLASI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI PROVINSI ACEH”. Shalawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW, keluarga serta para sahabat beliau sekalian. Keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan doa dari semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih atas segala bantuan, saran, dan kritikan yang telah diberikan demi kesempurnaan skripsi ini, kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam proses pembelajaran.
2. Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si. selaku Ketua program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry dan Marwiyati, SE., MM selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Ekonomi

3. Muhammad Arifin, Ph.D dan Rachmi Meutia, M.Sc selaku Ketua dan Sekretaris Lab Prodi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry serta sebagai penguji 1 yang telah banyak memberikan masukan dan saran yang baik bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Dr. Idaryani, SE., M.Si sebagai Dosen Pembimbing I dan Yulindawati, SE., MM sebagai dosen pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan banyak masukan bagi penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Dr.Maimun, SE.,Ak. M.Si sebagai dosen penguji 1 yang telah memberikan masukan dan saran yang baik bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Prof. Dr. Nazaruddin A, Wahid, MA selaku Penasehat Akademik (PA) penulis serta seluruh dosen dan staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, khususnya program studi ilmu ekonomi yang telah memberikan ilmu, pengalaman, arahan, serta perhatiannya kepada penulis selama menempuh pendidikan program studi strata satu (S1) Ilmu Ekonomi.
7. Kedua orang tua Ayahanda tercinta Usman dan Ibunda Zuriani serta kakak Fauzi Ati beserta abang Khairuddin dan Adik Naila Salsabila yang selalu memberikan kasih

sayang, do'a dan nasehat, serta dorongan selama penulis mengikuti perkuliahan sampai menyelesaikan pendidikan.

8. Kepada teman seperjuangan program studi ilmu ekonomi letting 17 terutama mauidya nadila, Riska Yuni Rahayu, Shinta Mawardani, Liza Zahara dan semua kawan-kawan letting 17 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, serta kawan-kawan dari PPG Squad.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung yang tidak mungkin dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini tidak lepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran atau ide-ide yang bersifat membangun dan bermanfaat dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan umumnya dan yang terkait khususnya.

Banda Aceh, 9 Maret 2022
Penulis,

Nurul Fitri

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

kaifa : كيف
hauula : هول

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
أ/إِ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

qāla : قَالَ
ramā : رَمَى
qīla : قِيلَ
yaqūlu : يَقُولُ

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

raudāh al-atfāl/ raudatul atfāl : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
al-Madīnah al-Munawwarah/ : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
al-Madīnatul Munawwarah
Talḥah : طَلْحَة

**Catatan:
Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Nurul Fitri
NIM : 170604004
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ilmu Ekonomi
Judul : Pengaruh Jumlah Penduduk dan Inflasi Terhadap
Penerimaan Pajak Daerah di Provinsi Aceh
Pembimbing I : Dr. Idaryani, SE.,M.Si
Pembimbing II : Yulindawati, SE.,M.M

Pajak daerah adalah salah satu komponen dari pendapatan asli daerah yang memiliki peranan sangat penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Penerimaan dari sektor pajak daerah memberikan sumbangan yang terbesar terhadap total penerimaan pendapatan asli daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah jumlah penduduk dan inflasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi Aceh, baik itu secara parsial maupun simultan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode kuantitatif. Model analisis menggunakan Model Regresi Linear Berganda. Data yang digunakan adalah data *time series* tahunan dari tahun 1990 sampai 2020. Hasil penelitian menunjukkan secara parsial jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi Aceh sedangkan inflasi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi Aceh. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa jumlah penduduk dan inflasi secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi Aceh.

Kata Kunci: Jumlah Penduduk, Inflasi, dan Penerimaan Pajak Daerah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPEL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN SIDANG MUNAGASYAH	iv
PENGESAHAN SIDANG MUNAGASYAH	v
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ...	x
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Manfaat Penelitian	13
1.5 Sistematika Penulisan	15
BAB II LANDASAN TEORI	16
2.1 Pajak	16
2.1.1 Pengertian Pajak	16
2.1.2 Fungsi Pajak	18
2.1.3 Jenis Pajak	20
2.2 Pajak Daerah.....	25
2.2.1 Pengertian Pajak Daerah	25
2.2.2 Prinsip-Prinsip Pajak Daerah	27
2.2.3 Jenis-Jenis Pajak Daerah	32
2.2.4 Tarif Pajak Daerah.....	33
2.2.5 Dasar Pengenaan Pajak Daerah.....	36
2.2.6 Sistem Pemungutan Pajak Daerah.....	40
2.3 Jumlah Penduduk	43

2.3.1 Pengertian Jumlah Penduduk	43
2.3.2 Kependudukan di Indonesia	44
2.3.3 Komponen Pertumbuhan Penduduk	46
2.4 Inflasi	48
2.4.1 Pengertian Inflasi	48
2.4.2 Penyebab Inflasi	49
2.4.3 Penggolongan Inflasi	52
2.4.4 Dampak Negatif Inflasi	56
2.4.5 Cara Mengatasi Inflasi	61
2.5 Pengaruh Antar Variabel	63
2.5.1 Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Penerimaan Pajak Daerah	63
2.5.2 Pengaruh Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah	65
2.6 Penelitian Terkait	66
2.7 Kerangka Pemikiran	72
2.8 Hipotesis Penelitian	73
BAB III METODE PENELITIAN	74
3.1 Jenis Penelitian	74
3.2 Jenis dan Sumber Data	74
3.3 Teknik Pengumpulan Data	75
3.4 Variabel Penelitian	75
3.4.1 Variabel Dependen	76
3.4.2 Variabel Independen	76
3.5 Definisi Operasional	76
3.6 Model Penelitian	77
3.7 Teknik Analisis Data	78
3.7.1 Uji Asumsi Klasik	78
3.8 Pengujian Hipotesis	81
3.8.1 Uji f (Uji Simultan)	81
3.8.2 Uji T (Uji Parsial)	82
3.9 Koefisien Determinasi	83
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	84
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	84
4.2 Gambaran Umum Variabel Penelitian	86
4.3 Uji Asumsi Klasik	89

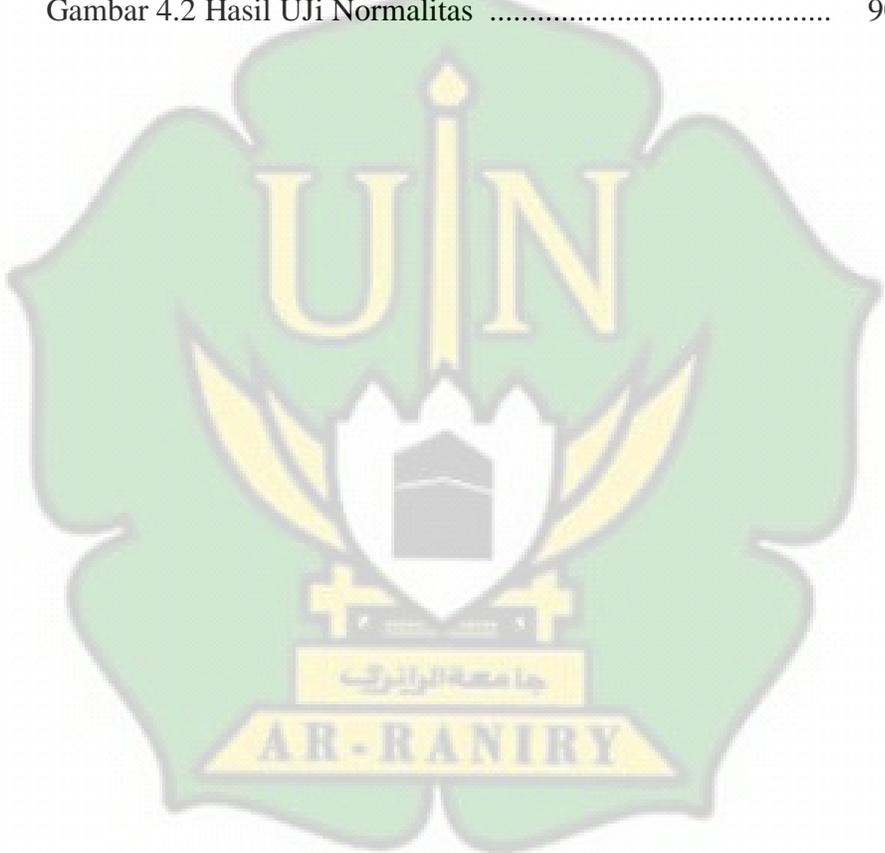
4.3.1 Uji Normalitas	90
4.3.2 Uji Multikolinearitas	91
4.3.3 Uji Heteroskedastisitas	92
4.3.4 Uji Autokorelasi	93
4.4 Teknik Analisis Data	94
4.5 Pengujian Hipotesis	96
4.5.1 Pengaruh Jumlah Penduduk dan Inflasi Terhadap Pajak Daerah (Uji T)	96
4.5.2 Pengaruh Jumlah Penduduk dan Inflasi Terhadap Pajak Daerah (Uji F)	97
4.6 Koefisien Determinasi (R^2)	98
4.7 Pembahasan Hasil Penelitian.....	99
4.7.1 Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Penerimaan Pajak Daerah.....	99
4.7.2 Pengaruh Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah	101
BAB V PENUTUP	104
5.1 Kesimpulan	104
5.2 Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	106

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Pajak Daerah Provinsi Aceh 2020	5
Tabel 1.2 Jumlah Penduduk (Jiwa) Provinsi Aceh 2016-2020	7
Tabel 1.3 Laju Pertumbuhan Inflasi Provinsi Aceh Tahun 2016-2020	9
Tabel 1.4 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Aceh Tahun 2016-2020	10
Tabel 2.1 Penelitian Terkait	66
Tabel 3.1 Definisi dan Operasional Variabel.....	76
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Aceh 2020	85
Tabel 4.2 Pajak Daerah Provinsi Aceh 2016-2020.....	87
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Provinsi Aceh 2016-2020.....	88
Tabel 4.4 Laju Pertumbuhan Inflasi Tahunan Provinsi Aceh 2016-2020.....	89
Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinearitas.....	91
Tabel 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas	92
Tabel 4.7 Hasil Uji Autokorelasi.....	93
Tabel 4.8 Hasil Regresi Linear Berganda	94
Tabel 4.9 Hasil Uji T	96
Tabel 4.10 Hasil Uji F.....	97
Tabel 4.11 Hasil Koefisien Determinasi (R^2).....	99

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	73
Gambar 4.1 Peta di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh	84
Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas	90



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Data Jumlah Penduduk, Inflasi dan Penerimaan Pajak Daerah Tahun 1990-2020	111
Lampiran 2 Data Yang Sudah di Log	112
Lampiran 3 Hasil Regresi Eviews	113



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia sudah sejak lama merencanakan sebuah gerakan pembangunan yang dinamakan dengan istilah pembangunan nasional. Pembangunan nasional yaitu suatu proses yang terjadi secara berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat baik dari segi materiil maupun dari segi spiritual. Dalam upaya melaksanakan pembangunan yang terdapat di Indonesia. Pembangunan daerah merupakan bagian terpenting dari adanya pembangunan nasional yang ditujukan untuk perkembangan sebuah daerah serta meningkatkan laju pertumbuhan yang ada pada setiap daerah dimana pembangunan tersebut dikaitkan sesuai dengan kebutuhan wilayah serta kemampuan wilayah tersebut dalam meningkatkan kemampuan yang ada di daerahnya (Nurrohman, 2010).

Potensi perekonomian yang dimiliki oleh negara Indonesia berbeda-beda di setiap daerahnya. Untuk menghadapi keadaan tersebut maka dilaksanakan pembangunan yang lebih menyeluruh di setiap daerah. Dimana pembangunan yang telah dilaksanakan tidak terlepas dari pembangunan suatu daerah yang merupakan bagian terpenting dari adanya pembangunan nasional. Sehingga setiap daerah diharapkan memahami kemampuan yang terdapat di daerahnya agar terpenuhinya kebutuhan pada daerahnya (Arianto, 2014).

Pelaksanaan program otonomi daerah yang ada di Indonesia yang mulai diberlakukan pada 1 januari 2001 mengharuskan setiap daerah untuk mampu meningkatkan pendapatan daerahnya yaitu pendapatan asli daerah (PAD) yang digunakan untuk pembiayaan pengeluaran pemerintah dalam upaya melaksanakan pemerintahan yang ada didaerahnya serta mampu mengembangkan daerahnya dalam berbagai bidang diantaranya peningkatan bantuan terhadap masyarakat, peningkatan kemandirian daerah, serta peningkatan persaingan daerah pada saat terjadinya pertumbuhan. (H.A.W Widjaja, 2002).

Pelaksanaan otonomi daerah dilakukan dengan pemberian wewenang yang besar, jelas dan dapat untuk dipertanggung jawabkan terhadap wilayah dengan cara yang proporsional yang dilaksanakan dengan suatu pengaturan, pembagian, dan penggunaan sumber daya nasional yang berkeadilan (Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah). Dengan adanya pelimpahan wewenang maka peran keuangan daerah menjadi lebih penting karena daerah dituntut lebih aktif dalam hal mengelola keuangan yang ada di daerahnya sendiri. Hal ini berarti daerah otonom mempunyai keahlian dalam mencari asal dana daerahnya sendiri dan dukungan bantuan dari pemerintahan pusat akan menjadi sedikit yang menyebabkan sumber keuangan daerah sendiri yaitu pendapatan asli daerah menjadi yang terbesar (Nurrohman, 2010).

Saputra, Sudjana & Djudi (2014) menjelaskan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan dari segi keuangan yang digunakan untuk melaksanakan program otonomi yang terdapat didaerahnya. Keberhasilan sebuah otonomi daerah dapat dipengaruhi oleh naik atau menurunnya pendapatan asli daerah tersebut. Berjalannya otonomi yang terdapat di sebuah wilayah menjadi lebih maksimal karena adanya sumber pendapatan asli daerah. Jika penerimaan yang terdapat pada sebuah wilayah mengalami peningkatan artinya pembangunan yang terdapat di wilayah tersebut juga lebih cepat dan kesejahteraan penduduknya dapat dibantu oleh pemerintahan.

Provinsi Aceh merupakan salah satu Provinsi yang yang memberlakukan Otonomi Daerah yang diberikan wewenang sangat besar untuk daerahnya agar dapat mengurus dan mengelola sumber pendapatan asli didaerahnya secara lebih baik. Komponen pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lainlain pendapatan asli daerah yang sah. Di antara komponen pendapatan daerah terutama pendapatan di bidang retribusi dan pajak daerah diharapkan untuk mampu menyumbangkan hasil yang memuaskan sehingga pendapatan asli daerah bisa lebih meningkat (Kusuma, 2013).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah, Pajak daerah merupakan kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang

pribadi maupun sebuah badan yang bersifat memaksa dan berdasarkan oleh Undang-Undang serta tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang hasil perolehan pajak tersebut digunakan untuk kepentingan yang ada di daerah dan kepentingan masyarakat. Dengan diterbitkannya UU No 28 Tahun 2009 yang berisi mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atas perbaikan dari UU No 34 Tahun 2000, disebutkan bahwa adanya pengalihan pajak pusat menjadi pajak daerah. Macam-macam pajak daerah ini diantaranya pajak Provinsi yang terdiri dari pajak kendaraan bermotor, Bea balik ama kendaraan bermotor, ppajak air permukaan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak rokok. Sedangkan pajak kabupaten/Kota terdiri dari pajak hotel, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak restoran, pajak sarang burung wallet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan pajak bea perolehan atas tanah dan bangunan. Pada tanggal 1 januari 2011 pajak bea perolehan ha katas tanah dan bangunan resmi diberlakukan dan pada tanggal 1 januari 2014 pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan juga mulai diberlakukan yang merupakan pajak pengalihan yang bertujuan sebagai sumber penerimaan pajak daerah tambahan demi meningkatkan pendapatan asli daerah.

Golongan penerimaan pajak daerah di Provinsi Aceh yang menjadi konsen penelitian adalah keseluruhan dari penerimaan

pajak daerah Provinsi, yaitu yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok. Dimana pajak kendaraan bermotor merupakan sumber penerimaan pajak daerah yang terbesar di Provinsi Aceh. Data jenis-jenis pajak daerah yang ada di Provinsi Aceh pada tahun 2020 dapat di lihat pada tabel 1.1 di bawah ini:

Tabel 1.1
Pajak Daerah Provinsi Aceh Tahun 2020

No	Jenis Pajak Daerah	2020
1	Pajak Kendaraan Bermotor	Rp484.694.888.039.50
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Rp290.706.133.250.00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Rp319.325.065.709.00
4	Pajak Air Permukaan	Rp1.897.658.782.15
5	Pajak Rokok	Rp381.367.321.189.00

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2020).

Dari tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa pajak kendaraan bermotor memberikan kontribusi paling besar yaitu sebesar Rp484.694.888.039.50 terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi Aceh, kemudian pajak rokok sebesar Rp381.367.321.189.00, pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar Rp319.325.065.709.00, bea balik nama kendaraan bermotor sebesar Rp290.706.133.250.00, dan terakhir ada pajak air permukaan sebesar Rp1.897.658.782.15.

Jumlah penduduk merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah baik tinggi maupun dalam jumlah rendah. Jika sebuah daerah mempunyai penduduk yang tinggi maka proses pembangunan daerah bisa dilaksanakan lebih cepat tetapi jika sebuah wilayah mempunyai penduduk yang rendah maka pembangunan wilayah juga menjadi lama dalam pelaksanaannya. Apabila pembangunan di sebuah wilayah berjalan cepat maka pajak yang di terima wilayah menjadi besar sebab masyarakat mengetahui bahwa pajak yang diterima pada sebuah wilayah ditujukan untuk membiayai kebijakan dan pembangunan daerah di masa yang datang (Prasetyo, 2016).

Bertambahnya jumlah penduduk pada sebuah wilayah bisa mempengaruhi pajak yang diterima oleh daerah sebab seiring dengan jumlah penduduk yang bertambah di sebuah wilayah dapat membuat jumlah wajib pajak pada suatu daerah mengalami peningkatan sehingga nantinya pajak yang diterima daerah juga mengalami peningkatan. Sebab adanya penambahan jumlah penduduk yang ada di suatu wilayah mampu memberikan dampak terhadap pajak yang diterima daerah secara langsung (Saputra, Sudjana & Djudi, 2014).

Jumlah penduduk sebuah daerah ataupun negara bisa dikategorikan sebagai suatu modal ataupun sebuah beban pembangunan. Hal ini didasari fakta bahwasanya besarnya total penduduk tidak dibarengi dengan kualitas yang mencukupi berupa segi fisik (kesehatan), pendidikan, atau keahlian diri dalam

menyesuaikan terhadap perkembangan teknologi yang dapat membantu proses pembangunan suatu daerah. Tetapi apabila keadaan yang berlangsung berbeda maka akan menjadi hambatan dalam pembangunan suatu daerah serta akan menghambat jalannya pertumbuhan ekonomi di Negara yang terkait (Utoyo, 2009). Menurut BPS (2020) jumlah penduduk di Provinsi Aceh dari tahun 2016-2020 dapat di lihat dari tabel 1.2 di bawah ini:

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk (Jiwa) Provinsi Aceh 2016-2020

No	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	2016	5.096.248
2	2017	5.189.466
3	2018	5.281.314
4	2019	5.371.532
5	2020	5.459.891

Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh (2021).

Berdasarkan tabel 1.2 di atas memperlihatkan bahwa jumlah penduduk yang ada di Provinsi Aceh setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2016 jumlah penduduk di Provinsi Aceh sebesar 5.096.248 jiwa, dan pada tahun 2020 jumlah penduduk di Provinsi Aceh meningkat sebesar 5.459.891 jiwa.

Menurut Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian dalam negeri golongan penduduk usia produktif yang memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi Aceh berada pada usia produktif yaitu

pada usia 15-64 tahun. Dimana penduduk Aceh juni 2021 sebesar 5.33 juta jiwa. Dari jumlah tersebut sebanyak 3,52 juta jiwa (66,2%) penduduk yang ada di Provinsi Aceh merupakan penduduk yang berada pada kelompok usia yang produktif yaitu (15-64 tahun). Terdapat juga 1,8 juta jiwa (33,8%) penduduk Aceh merupakan kelompok usia yang tidak produktif. Dengan rincian penduduk usia belum produktif (0-14 tahun) sebesar 1,54 juta jiwa (29,4%) dan penduduk usia sudah tidak produktif (65 tahun ke atas) sebesar 255,81 ribu (4,8%).

Faktor lain yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah yang ada di suatu wilayah adalah tingkat inflasi. Jika sebuah wilayah mempunyai laju inflasi yang normal maka pembangunan yang ada pada wilayah tersebut bisa terlaksana tanpa adanya suatu kendala sementara jika sebuah wilayah mempunyai laju inflasi yang cenderung naik turun maka pembangunan di wilayah tersebut juga mengalami adanya suatu kendala (Prasetyo, 2016). Inflasi adalah kecendrungan suatu harga untuk naik secara terus menerus dan juga menyeluruh. Jika harga barang dan jasa meningkat maka akan berakibat langsung pada keadaan ekonomi dan bisa membuat kesadaran wajib pajak masyarakat menjadi menurun untuk membayar pajak (Saputra, Sudjana & Djudi, 2014).

Menurut Nurrohman (2010) inflasi memiliki efek yang besar pada perekonomian sebuah negara. Adanya inflasi mampu berimbas terhadap penurunan daya beli penduduk dan mengakibatkan naiknya tarif produksi perusahaan. Naiknya tarif

produksi mampu mengakibatkan berkurangnya pendapatan yang di peroleh oleh perusahaan. Sebab pendapatan yang diterima perusahaan berkurang otomatis pajak yang diterima dan sudah di punggut oleh pemerintah pada perusahaan itu juga berkurang. Tingkat inflasi sangat mempengaruhi pajak daerah yang diterima sebab jika inflasi naik maka pajak yang diterima daerah akan menurun.

Jenis inflasi yang paling mempengaruhi penerimaan pajak daerah adalah inflasi yang tidak terkendali (Hiperinflasi) yaitu apabila serangan inflasi demikian hebatnya sehingga saat harga-harga terus berubah dan meningkat sehingga orang tidak dapat menahan uang lebih lama disebabkan nilai 30 uang terus merosot. Inflasi ini terjadi jika kenaikan harga berada di atas 100% setahun (Mankiw, 2006:95). Menurut BPS (2020) laju pertumbuhan inflasi di Provinsi Aceh dalam lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2016-2020 dapat di lihat dari tabel 1.3 di bawah ini:

Tabel 1.3
Laju Pertumbuhan Inflasi Provinsi
Aceh tahun 2016-2020

No	Tahun	Inflasi (%)
1	2016	3.95
2	2017	4.25
3	2018	1.84
4	2019	1.69
5	2020	3.59

Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh (2021).

Berdasarkan tabel 1.3 di atas memperlihatkan bahwa rata-rata inflasi yang terjadi dari tahun 2016-2020 mengalami kenaikan dan penurunan. Dimana inflasi pada tahun 2016 sebesar 3,95%, dan mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebesar 4, 25%, dan menurun pada tahun 2018 sebesar 1,84%, dan pada tahun 2019 juga menurun sebesar 1,69%, dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 3,59%.

Penerimaan pajak daerah mempunyai kontribusi besar pada sistem penerimaan daerah di Provinsi Aceh. Tidak hanya dari sisi penerimaan daerah, penerimaan pajak juga sebagai sumber pendanaan utama dalam mendanai total belanja daerah sehingga pajak juga memiliki peran strategis terhadap kegiatan pengeluaran pemerintah. Permasalahan terkait target penerimaan pajak daerah di Provinsi Aceh yang tidak tercapai terjadi dalam tiga tahun terakhir. Gambaran target dan realisasi pajak daerah di Provinsi Aceh selama tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 1.4 berikut:

Tabel 1.4
Target dan Realisasi Pajak Daerah
Provinsi Aceh Tahun (2016-2020)

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2016	1.219.985.562.000	1.252.750.000.000	102,69%
2	2017	1.299.742.665.000	1.315.393.895.060	101,20%
3	2018	1.371.579.749.941	1.309.081.813.533	95,44%
4	2019	1.509.791.063.991	1.409.251.915.061	93,34%
5	2020	1.617.438.860.000	1.477.991.066.970	91,38%

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2021).

Berdasarkan tabel 1.4 di atas diketahui bahwa penerimaan pajak daerah di Provinsi Aceh selama lima tahun terakhir yakni di tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami peningkatan dan hanya pada tahun 2018 realisasi pajak daerah mengalami penurunan. Realisasi pajak daerah Provinsi Aceh belum memenuhi target pajak daerah yang sudah ditetapkan oleh Provinsi Aceh. Dimana tahun belum terpenuhinya realisasi pajak daerah berlangsung di tahun 2018, 2019, dan 2020. Dimana pada tahun 2018 target pajak daerah yang ditetapkan Provinsi Aceh sebesar Rp1.371.579.749.941 tetapi yang terealisasi sebesar 95,44% yaitu sebanyak Rp1.309.081.813.533 dan pada tahun 2019 ditetapkan target penerimaan pajak daerah Provinsi Aceh sebesar Rp1.509.791.063.991 tetapi hanya terealisasi sebesar 93,34% yaitu sebanyak Rp1.409.251.915.061 dan pada tahun 2020 target pajak daerah Provinsi Aceh yang ditetapkan sebesar Rp1.617.438.860.000 tetapi hanya terealisasi sebesar 91,38% yaitu sebanyak Rp1.477.991.066.970.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sania, Yunita, & Muttaqin (2018) dimana penelitiannya menunjukkan jumlah penduduk dan inflasi secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Secara parsial Jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari & Ilyas (2016) Dimana hasil penelitiannya menunjukkan Jumlah penduduk

tidak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi Bengkulu. Artinya jumlah penduduk yang besar pada suatu wilayah belum tentu akan membuat pajak daerah meningkat sebab tidak semua kalangan masyarakat produktif di kisaran umur lima belas hingga umur enam puluh empat mempunyai kerja serta memiliki pendapatan yang pasti.

Menurut penelitian yang dilakukan Sania, Yunita, & Muttaqin (2018), dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten dan Kota di provinsi Jawa Tengah. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Sari & Ilyas (2016) dimana hasil penemuannya menunjukkan bahwa inflasi tidak mempunyai pengaruh negatif terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi Bengkulu. Artinya inflasi yang ada di Provinsi Bengkulu yaitu tidak berpengaruh negatif dan bisa mendukung naiknya penerimaan pajak yang ada di daerah dengan ketentuan inflasi yang sedang berlangsung tergolong ke dalam jenis inflasi yang ringan yaitu dibawah sepuluh persen, dengan laju inflasi yang berlangsung di perkirakan sama untuk setiap Kabupaten dan Kota.

Berdasarkan penelitian yang berbeda di atas, maka mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh jumlah penduduk dan inflasi Terhadap Penerimaan pajak daerah di Provinsi Aceh”**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- a. Apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi Aceh?
- b. Apakah inflasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi Aceh?
- c. Apakah jumlah penduduk dan inflasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian yaitu:

- a. Untuk mengetahui apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi Aceh
- b. Untuk mengetahui apakah inflasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi Aceh
- c. Untuk mengetahui apakah jumlah penduduk dan inflasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian.

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa manfaat yang diperoleh oleh beberapa pihak diantaranya adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan pemikiran dalam upaya pengaruh

jumlah penduduk, inflasi, terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi Aceh.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada:

a. Kepada Penulis

Penelitian ini merupakan suatu kewajiban agar dapat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Penelitian ini menjadi permulaan saya dalam memasuki dunia kerja dan diharapkan penelitian ini mampu memberikan penjelasan dan menjadi materi masukan terhadap pihak yang melaksanakan penelitian.

b. Kepada Universitas

Diharapkan penelitian bisa menjadi materi acuan terhadap pengkaji yang lain saat melaksanakan penelitian yang serupa serta dapat menjadi suatu materi bahan perbandingan.

c. Kepada Instansi terkait

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi suatu anjuran terhadap pemerintah aceh terutama di bidang pengaruh jumlah penduduk dan inflasi terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi Aceh. Dimana pemerintah aceh dapat lebih meningkatkan penerimaannya terutama penerimaan dari segi pajak daerahnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini dilakukan dengan sistematis dalam lima bab meliputi:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, mamfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II landasan Teori

Pada bab ini memuat mengenai teori pajak, teori pajak daerah, jumlah penduduk, dan teori inflasi. Selanjutnya dipaparkan pula hubungan antara jumlah penduduk dengan penerimaan pajak daerah, dan hubungan antara inflasi dengan penerimaan pajak daerah. Kemudian bab ini juga berisi penelitian terkait, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III Metode Penelitian

Menerangkan secara jelas mengenai jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, definisi operasional, model penelitian, serta teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan pembahasan

Bab ini memuat mengenai analisis data dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Bab ini merupakan penataan penulisan paling terakhir yang memuat tentang kesimpulan dari kajian yang sudah dilaksanakan serta saran untuk penelitian atau lembaga yang terlibat pada penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian pajak

Pengertian pajak berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2009 yang berisi mengenai ketentuan umum dan aturan mengenai pajak. Pajak yaitu kontribusi wajib pada negara yang ditanggung sendiri oleh individu ataupun instansi yang sifatnya dapat dipaksa menurut perundang-undangan dan tidak memperoleh kompensasi secara langsung yang berfungsi untuk kepentingan negara serta membantu mensejahterakan masyarakat.

Menurut Siahaan (2016: 7) pajak merupakan pungutan yang dikenakan kepada masyarakat dari pemerintah menurut perundang-undangan yang sifatnya dapat dipaksakan dan terhutang bagi mereka yang wajib untuk membayarnya tanpa secara langsung memperoleh hasilnya. Dimana pajak berfungsi untuk pembiayaan pengeluaran negara saat menyelenggarakan pemerintahan dan upaya pembangunan. Berarti pajak merupakan sebuah kewajiban yang harus dibayar berdasarkan perundang-undangan yang tidak bisa dihindarkan oleh si wajib pajak dan mereka yang tidak mau membayar pajak bisa dilakukan dengan cara paksa.

Suprianto (2011: 1) menjelaskan pajak adalah pungutan atau iuran wajib yang dikutip oleh pemerintahan kepada penduduk dalam rangka menutup anggaran rutin negara dan pembiayaan

pembangunan dengan tidak mengharap kompensasi secara langsung. Tetapi secara akal sehat pajak yang dibayarkan oleh penduduk berdampak langsung terhadap kemakmuran penduduk seperti dibangunkannya jalan, jembatan, dan tempat umum yang lainnya.

Menurut Simanjuntak dan Mukhlis (2012:9) pajak merupakan salah satu pendapatan pemerintah yang terpenting untuk mendukung biaya pembangunan di sebuah negara. Besar atau kecilnya pajak akan memutuskan besaran pengeluaran negara untuk mendanai belanja dalam negeri baik dari sisi pembangunan ataupun dalam hal membiayai anggaran rutin. Artinya pajak merupakan suatu kewajiban yang merupakan suatu bentuk pemindahan pendapatan dari penduduk terhadap pemerintah negara dengan ketentuan berlandaskan peraturan perundang-undangan yang dapat dipaksa yang bertujuan untuk kepentingan negara. Dimana di dalamnya ada suatu kewajiban semua warga negara untuk dapat memenuhi kewajibannya dan jika tidak membayar pajak akan memperoleh sanksi oleh pemerintahan.

Berdasarkan definisi di atas bisa di ambil kesimpulan bahwa pajak adalah pungutan yang harus dibayar oleh rakyat kepada pemerintahan negara yang dapat dipaksakan menurut perundangundangan yang ada namun tidak mendapatkan kompensasi secara langsung dan pajak tersebut digunakan untuk kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Hal ini juga berarti pajak ialah iuran wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang tidak dapat dihindarkan oleh wajib pajak dan bagi mereka yang enggan membayar pajak bisa untuk dipaksa atau memperoleh suatu sanksi.

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Halim, Bawono & Dara (2020) ada dua fungsi dari pajak yaitu:

1. Fungsi Anggaran

Kontribusi terbesar terhadap penerimaan negara ialah pajak. Dimana pajak yang diterima untuk memenuhi posisi APBN yaitu berkisar antara 60 hingga 70% dimana pembiayaan belanja rutin atau pengeluaran untuk pembangunan berasal dari penerimaan negara yaitu pajak.

2. Fungsi mengatur

Mengatur masyarakat dalam melakukan kebijakan pemerintah di segi sosial ataupun ekonomi seperti:

- a. Membantu meningkatkan investasi yang ada di dalam negara melalui pemberian insentif pajak.
- b. Menurunkan penggunaan minuman beralkohol dengan pengenaan pajak yang tinggi.
- c. Meningkatkan ekspor produk yang terdapat di sebuah negeri dengan cara pajak yang dikenakan tidak ada atau nol.

Menurut Mardiasmo (2016) terdapat dua fungsi dari pajak diantaranya adalah:

1. Fungsi Anggaran

Berfungsi sebagai salah satu sumber pendapatan bagi sebuah pemerintah agar mampu melaksanakan pembiayaan di bidang pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur

Berfungsi dalam hal mengatur ataupun melakukan kebijakan negara dari segi ekonomi maupun sosial, seperti:

- a. Menurunkan penggunaan minuman beralkohol dengan cara pengenaan pajak yang tinggi.
- b. Mengurangi gaya hidup masyarakat yang boros dengan cara pajak dikenakan terhadap barang mewah harus tinggi.

Menurut Sudirman & Amiruddin (2015) pajak mempunyai fungsi diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Segi Penerimaan

Pajak ialah salah satu sumber penerimaan negara untuk memasukan uang ke dalam kas pemerintah dengan ketentuan yang sudah berlaku. Pajak berfungsi untuk membiayai belanja rutin dan pengeluaran pembangunan negara.

2. Segi Stabilitas

Sebuah negara bisa mengurus aktivitas ekonominya melalui pajak yang diterima demi menciptakan situasi perekonomian yang lebih stabil. Misalnya pemerintah berniat menstabilkan harga produk televisi.

3. Segi Pemerataan

Tugas negara adalah memajukan laju pertumbuhan ekonomi. Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi maka negara memerlukan anggaran untuk pembiayaan segi pembangunan yang ada. Pendanaan pembangunan salah satunya berasal dari pajak. Pembangunan infrastruktur dilaksanakan untuk mendorong tumbuhnya perekonomian negara dan meningkatkan peluang pekerjaan agar tercapainya pembangunan yang lebih merata.

2.1.3 Macam-Macam Pajak

Menurut Halim, Bawono & Dara (2020) macam-macam pajak bisa dikategorikan ke dalam tiga macam diantaranya:

1. Pajak berdasarkan kelompoknya
 - a. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh yang bersangkutan (wajib pajak) dimana bebannya tidak bisa diwakilkan terhadap orang lain. Contohnya pajak penghasilan.
 - b. Pajak tak langsung adalah pajak yang bisa diwakilkan kepada orang lain (pihak ketiga).
Contohnya Pajak Pertambahan Nilai.

2. Pajak berdasarkan sifat

- a. Pajak subyektif adalah pajak yang didasarkan kepada subyeknya kemudian mencari tujuannya dengan maksud memperdulikan kondisi dari yang kena pajak. Contohnya pajak penghasilan.
- b. Pajak objektif adalah pajak yang tidak memandang status dari si (wajib Pajak) atau pajak yang berlandaskan pada objeknya. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai.

3. Pajak berdasarkan badan pemungutannya

- a. Pajak pusat adalah pajak daerah yang dikutip oleh negara yang berfungsi untuk pembiayaan kepentingan yang ada di dalam negara. Contohnya pajak pertambahan nilai.
- b. Pajak daerah adalah pajak yang dikutip oleh pemerintahan daerah yang berfungsi untuk pembiayaan kepentingan yang ada didaerahnya. Terdapat dua macam pajak daerah diantaranya yaitu:
 1. Pajak Provinsi yang meliputi: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.
 2. Pajak Kabupaten/Kota yang meliputi: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan

Logam dan Batuan, pajak Parkir, dan Pajak Air Tanah.

Menurut Resmi (2016) macam-macam pajak bisa di kategorikan ke dalam tiga macam diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkankan golongan

Berdasarkan golongannya dapat diklasifikasikan kedalam 2 macam diantaranya adalah:

- a. Pajak langsung adalah pajak yang ditanggung oleh individu (wajib pajak) dimana tidak bisa diserahkan terhadap pihak ketiga (orang lain) dan harus ditanggung sendiri oleh yang berkewajiban membayar pajak. Contohnya ialah pajak penghasilan.
- b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bisa diserahterimakan pada pihak ketiga (orang lain). Contohnya pajak pertambahan nilai.

2. Berdasarkan Sifat

Menurut sifatnya pajak bisa dikategorikan ke dalam dua macam diantaranya adalah:

- a. Pajak subyektif adalah pajak yan pengenaanya melihat kondisi orang yang kena pajak. Contohnya ialah Pajak penghasilan.
- b. Pajak objektif adalah pajak yang dasar pengenaannya ditetapkan pada objek yang dituju, baik itu keadaan

objeknya, perbuatan ataupun aktivitas yang menimbulkan keharusan perpajakan, dengan tidak melihat kondisi orang yang harus membayar pajak serta dimana tinggalnya. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai.

3. Berdasarkan Badan Pemungutnya.

Berdasarkan badan pemungutnya pajak dapat diklasifikasikan ke dalam dua macam diantaranya adalah:

- a. Pajak pusat adalah pajak yang dikutip oleh negara yang berfungsi sebagai pembiayaan kepentingan yang ada dalam negaranya. Contohnya ialah: Pajak pertambahan nilai dan sebagainya.
- b. Pajak daerah adalah pajak yang dikutip oleh pemerintahan daerah, baik itu tingkat Provinsi ataupun tingkat Kabupaten atau Kota yang berfungsi dalam hal membiayai kepentingan yang ada pada daerahnya masing masing.
 1. Pajak Provinsi, contohnya ialah: Pajak Kendaraan Bermotor.
 2. Pajak Kabupaten atau Kota, contohnya ialah: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

Menurut Mardiasmo (2016) pajak dikelompokkan menjadi tiga jenis diantaranya ialah:

1. Berdasarkan golongan
 - a. Pajak langsung adalah pajak yang ditanggung sendiri bagi yang kena pajak dan tidak bisa diwakilkan terhadap orang lain. Contohnya adalah pajak penghasilan.
 - b. Pajak tidak langsung merupakan pajak yang punggutanya dapat diwakilkan kepada pihak ketiga. Contohnya ialah pajak pertambahan nilai.
2. Berdasarkan sifat
 - a. Pajak subyektif adalah pajak berdasarkan kepada obyek yang dituju dengan maksud melihat kondisi dari individu yang kena pajak. Contohnya pajak penghasilan.
 - b. Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya tapi melihat kondisi dari yang berkewajiban membayar pajak. Contohnya ialah pajak pertambahan nilai.
3. Berdasarkan badan pemungut
 - a. Pajak pusat adalah pajak yang dikutip oleh negara yang berfungsi sebagai pembiayaan kepentingan yang terdapat pada sebuah negara. Contohnya ialah pajak penghasilan.
 - b. Pajak daerah adalah pajak yang dikutip oleh pemerintahan daerah yang berfungsi sebagai

pembiayaan kepentingan yang terdapat pada sebuah daerah. Pajak Daerah meliputi:

1. Pajak Provinsi, contohnya adalah: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Pajak Kabupaten atau Kota, contohnya adalah: Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Hibura

2.2 Pajak Daerah

2.2.1 Definisi pajak daerah

Menurut peraturan perundang undangan No 34 tahun 2000 pasal 1 angka 6, pajak daerah ialah pungutan wajib yang dilaksanakan oleh sebuah wilayah terhadap individu ataupun sebuah lembaga dengan tidak mengharapkan kompensasi saat itu juga secara berimbang yang sifatnya dapat dipaksakan menurut peraturan undang-undang yang sudah ada yang berfungsi untuk pembiayaan penyelenggaraan dan pembangunan suatu daerah. Oleh karena itu pajak daerah adalah pajak yang ditentukan oleh sebuah daerah berdasarkan peraturan daerah yang pemungutannya dilaksanakan oleh daerah dimana penerimaannya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran daerah pada saat menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang berada didaerahnya. Pemerintahan daerah yang ada di negara ini ada dua yakni pemerintahan Provinsi dan pemerintahan Kabupaten atau Kota yang telah diberikan suatu wewenang agar mampu mengembangkan daerahnya. Pajak daerah di Indonesia

dikategorikan ke dalam dua tingkatan diantaranya pajak dari Provinsi dan pajak dari Kabupaten/Kota.

Menurut Yani (2013:52) pajak daerah adalah iuran wajib yang harus dilakukan individu ataupun sebuah lembaga kepada wilayah dengan tidak mengharap kompensasi saat itu secara seimbang serta dapat dipaksa menurut ketentuan undang undang yang ada dan berguna dalam pembiayaan saat menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pajak daerah merupakan pendapatan asli di daerah dan harus jadi sumber pendanaan saat menyelenggarakan urusan pemerintah dan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan penduduk. Dengan begitu suatu daerah dapat menjalankan otonomi daerahnya misalnya mampu dalam hal mengatur urusan rumah tangga daerahnya sendiri.

Menurut Hartati (2015:389) pajak daerah adalah pungutan yang berupa pajak dan dikutip oleh pemerintahan wilayah yang berguna dalam urusan pemerintah yang ada pada daerahnya. Pada umumnya pendapatan yang di miliki oleh setiap daerah yang masuk dalam kas daerah terutama bagi daerah yang memiliki otonomi daerah. Hak otonomi adalah hak untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran sendiri. Pendapatan yang dimiliki setiap daerah yang sudah memiliki hak otonomi daerah dibagi dalam dua bagian, yaitu pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan demikian setiap wilayah yang sudah mempunyai hak otonomi

daerah tidak terlalu mengantungkan pendapatannya dari pemerintahan pusat yang diperoleh melalui APBD.

Menurut Siahaan (2016: 9) pajak daerah merupakan iuran wajib yang harus dilaksanakan oleh suatu daerah terhadap individu ataupun sebuah lembaga dengan tidak mengharap balasan langsung yang setara dimana dapat dipaksakan berlandaskan perundang-undangan yang telah ditetapkan yang berfungsi dalam hal pembiayaan pengelolaan urusan pemerintahan yang ada di daerah serta pembangunan daerah. Artinya pajak daerah ialah pajak yang sudah ditetapkan oleh pemerintahan daerah dengan aturan daerah (perda) dimana kewenangan dalam pemungutan dijalankan oleh pemerintahan daerah dan penerimaannya dimanfaatkan untuk pembiayaan pengeluaran yang ada di daerah demi terlaksananya penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang ada di daerahnya.

Dari pengertian di atas bisa diambil kesimpulan bahwasanya pajak daerah ialah iuran wajib yang harus dibayar terhadap pemerintahan daerah yang dibebani kepada seorang individu maupun sebuah lembaga yang sifatnya dapat dipaksakan dan berlandaskan peraturan perundang-undangan tanpa mengharap suatu balasan saat itu juga dimana berguna untuk keperluan daerah seperti pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah serta untuk mensejahterakan masyarakat. Untuk mereka yang tidak ingin membayar pajak akan mendapat sanksi dari pemerintah.

2.2.2 Prinsip - Prinsip Pajak Daerah

Menurut Mahmudi (2010) Asas-asas pajak daerah dibagi menjadi lima yaitu:

1. Prinsip Elastisitas

Mampu menyumbangkan penerimaan pendapatan yang layak dan fleksibel dalam arti mengikuti kenaikan atau penurunan tarif penghasilan penduduk. Kaitan prinsip elastis pajak dalam pengelolaan pajak daerah ialah dimana saat menaikkan pajak pemerintah perlu meningkatkan penghasilan penduduk terlebih dahulu supaya nantinya penduduk tidak keberatan dalam hal membayar pajak.

2. Prinsip Keadilan

Keadilan di bidang sosial kemasyarakatan atau keadilan dalam menyetarakan setiap golongan penduduk merupakan prinsip dari keadilan. Keterkaitan prinsip keadilan terhadap pajak daerah adalah diperlukannya peran pemerintahan wilayah dalam penetapan harga yang menguntungkan dan meningkat pada kategori pajak tertentu dan melaksanakan ketentuan peraturan yang setara terhadap semua yang kena pajak agar tak terjadi adanya orang yang tak kena pajak.

3. Prinsip kemudahan Administrasi

Pajak daerah haruslah sederhana, fleksibel, perhitungan yang mudah, serta mampu berikan pelayanan yang baik kepada yang kena pajak. Keterkaitan prinsip

kemudahan administrasi dalam perpajakan ialah peran dari pemerintahan wilayah dalam memperbaiki sistem pajak daerah untuk memastikan terdapatnya kemudahan, kelugasan, keluwesan penduduk selama pembayaran.

4. Prinsip keberterimaan Politis

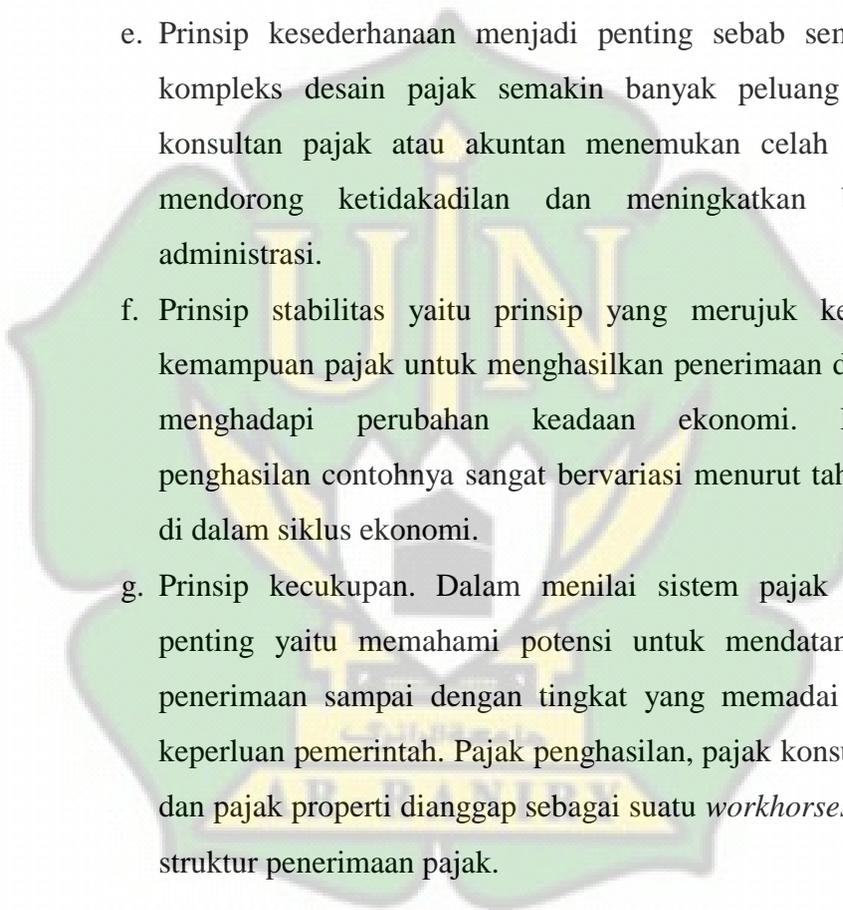
Pajak daerah haruslah bisa diterima oleh penduduk secara politis. Keterkaitan prinsip keberterimaan politis dalam pengelolaan pajak daerah ialah diperlukannya peran pemerintahan dan DPRD untuk kerjasama dan menyertakan sekelompok penduduk saat penetapan suatu kebijaksanaan dan sosialisasi pajak daerah. Apabila memungkinkan menyertakan penduduk saat proses pungutan pajak daerah.

5. Prinsip Non-distorsi terhadap perekonomian

Dampak pajak daerah terhadap perekonomian haruslah dampak yang positif dimana biasanya kutipan pajak menjadi suatu kewajiban terhadap produsen maupun konsumen. Namun kutipan pajak tidak boleh menjadi suatu hal yang tambah membebani dan berlebihan dimana dapat membuat penduduk dan perekonomian suatu wilayah mengalami kerugian.

Menurut widodo (2010) prinsip-prinsip perpajakan mengukur struktur penghasilan sesuai dengan kriteria ekonomi *neutrality*, efisiensi, keadilan, administrasi, kemudahan, stabilitas, dan kecukupan.

- a. *Tax neutrality*. Pajak biasanya mudah untuk dipahami atau dikenal sebagai pengurang dalam kegiatan ekonomi seperti pajak penghasilan yang bisa mengurangi insentif selama dalam bekerja, pajak penjualan bisa memperkecil transaksi-transaksi ritel, dan pajak tabungan bisa mengurangi kecendrungan untuk menabung. Pajak yang netral adalah pajak yang terbaik namun sebagian besar ruang lingkup masalah kita timbul dari fakta bahwa desain ataupun model perpajakan bersifat distorsif terhadap perekonomian kita.
- b. Efisien pajak kurang lebih seperti *tax Neutrality* dan merupakan ukuran berapa banyak perubahan perilaku tersebut terbebani. Itulah yang disebut dengan kelebihan beban pada ekonomi.
- c. Prinsip keadilan adalah inti di setiap diskusi mengenai desain pajak. Desain pajak memerlukan perhatian dengan baik apa yang adil dan sejauh mana hal ini terkadang harus di kompromikan untuk bisa memenuhi kriteria prinsip yang lainnya. Keadilan bisa di evaluasi sesuai dengan apa yang disebut dengan istilah keadilan horizontal yaitu sejauh mana mereka yang dalam keadaan yang serupa akan membayar beban pajak yang serupa pula. Istilah keadilan vertikal yaitu seberapa baik pajak kepada kelas yang berbeda memikul beban yang berbeda dalam struktur pajak.

- 
- d. Prinsip Administrasi pajak bertujuan untuk memudahkan dalam hal pengelolaan pemungutan pajak. Pajak yang mengubah ekonomi tidaklah efisien dan juga membebankan banyak biaya untuk administrasi.
 - e. Prinsip kesederhanaan menjadi penting sebab semakin kompleks desain pajak semakin banyak peluang dari konsultan pajak atau akuntan menemukan celah yang mendorong ketidakadilan dan meningkatkan biaya administrasi.
 - f. Prinsip stabilitas yaitu prinsip yang merujuk kepada kemampuan pajak untuk menghasilkan penerimaan dalam menghadapi perubahan keadaan ekonomi. Pajak penghasilan contohnya sangat bervariasi menurut tahapan di dalam siklus ekonomi.
 - g. Prinsip kecukupan. Dalam menilai sistem pajak yang penting yaitu memahami potensi untuk mendatangkan penerimaan sampai dengan tingkat yang memadai bagi keperluan pemerintah. Pajak penghasilan, pajak konsumsi, dan pajak properti dianggap sebagai suatu *workhorses* dari struktur penerimaan pajak.

Menurut Sinaga (2011) prinsip-prinsip pajak daerah diantaranya adalah:

- a. Prinsip pemberian penghasilan yang layak dan fleksibel yaitu mudah mengalami kenaikan dan penurunan diikuti

dengan meningkat atau turunnya penghasilan yang diterima oleh penduduk.

- b. Keadilan yang dilihat dari segi vertikal dan horizontal yaitu sinkron dengan tingkat golongan yang ada di penduduk dan bertindak dengan cara yang sama pada semua golongan penduduk dimana nantinya tidak akan ada lagi orang yang anti terhadap pajak.
- c. Manajemen yang fleksibilitas yaitu kesederhanaan, penghitungan yang lancar, serta perlakuan yang baik terhadap yang kena pajak.
- d. Penduduk dapat menerima pajak secara politis yang menyebabkan munculnya dorongan ataupun keinginan dari individu yang kena pajak saat melakukan pembayaran pajak.
- e. Non-distorsi pada sebuah ekonomi. Kaitan pajak berdampak sedikit pada sebuah ekonomi. Dimana kutipan pajak biasanya menjadi suatu kewajiban untuk masyarakat ataupun perusahaan. Dan diharapkan pajak tidak menjadi suatu kendala yang melewati batas kewajaran yang nantinya penduduk secara keseluruhan mengalami kerugian.

2.2.3 Macam-macam Pajak Daerah

Berdasarkan perundang-undangan Nomor 28 Tahun 2009 macam-macam pajak daerah diantaranya yaitu:

- a. Macam-macam pajak Provinsi meliputi:

1. Pajak Kendaraan Bermotor
 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 4. Pajak Air Permukaan
 5. Pajak Rokok
- b. Macam-macam pajak Kabupaten/Kota meliputi:
1. Pajak Hotel
 2. Pajak Restoran
 3. Pajak Hiburan
 4. Pajak Reklame
 5. Pajak Penerangan Jalan
 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 7. Pajak Parkir
 8. Pajak Air dan Tanah
 9. Pajak Sarang Burung Walet
 10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan/Perkotaan
 11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Menurut Hartati (2015) pajak daerah didasarkan pada hak otonomi daerah diklasifikasikan menjadi dua yaitu:

- a. Pajak Provinsi meliputi:
1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air
 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air
 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 4. Pajak Pengambilan dan Pemamfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
- b. Pajak Kabupaten atau Kota meliputi:
1. Pajak Hotel
 2. Pajak Restoran
 3. Pajak Hiburan
 4. Pajak Reklame
 5. Pajak Penerangan Jalan

6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
7. Pajak Parkir
8. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
9. Pajak Rokok

2.2.4 Tarif pajak Daerah

Salah satu faktor penentu tingginya pajak yang ditanggung oleh wajib pajak dalam perhitungan pajak ialah tarif pajak, dimana tingginya tarif pajak yang dikenakan terhadap semua pajak daerah memiliki peran yang sangat penting. Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 telah ditetapkan tarif oleh pemerintahan wilayah/daerah pada macam- macam pajak daerah. Biaya yang ditentukan adalah biaya yang tertinggi diantaranya adalah:

1. Biaya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tertinggi ditentukan sebesar 10 persen sebagai berikut:
 - a. Biaya pajak tertinggi untuk pajak kendaraan bermotor milik individu kesatu ditentukan senilai 2 persen.
 - b. Biaya pajak tertinggi untuk pajak kendaraan bermotor milik individu ke dua ditetapkan sebesar 10 persen.
 - c. Biaya pajak tertinggi untuk pajak kendaraan bermotor transportasi umum, seperti Ambulan, pemerintahan seperti transportasi tentara atau kepolisian, pemerintahan wilayah, atau transportasi yang sudah diatur berdasarkan ketentuan wilayah peraturan daerah yang ditentukan senilai 2 persen.

- d. Biaya pajak tertinggi terhadap pajak kendaraan bermotor pada transportasi muatan besar ditentukan sebesar 0,2 persen.
2. Biaya BBNKB tertinggi ditetapkan sebesar 20%, sebagai berikut:
 - a. Biaya BBNKB pemberian awal untuk yang tertinggi ditentukan senilai 20 persen.
 - b. Biaya BBNKB pemberian seterusnya untuk yang tertinggi ditentukan senilai 1 persen.
3. Biaya tertinggi untuk PBBKB ditentukan yaitu senilai 10 persen.
4. Biaya tertinggi untuk Pajak Air dan Permukaan ditentukan yaitu senilai 10 persen.
5. Biaya tertinggi untuk pajak Rokok ditentukan yaitu senilai 10 persen.
6. Biaya tertinggi untuk Pajak Hotel ditentukan yaitu senilai 10 persen.
7. Biaya tertinggi untuk Pajak Restoran ditentukan yaitu senilai 10 persen.
8. Biaya tertinggi untuk Pajak Hiburan ditentukan yaitu senilai 35 persen.
9. Biaya tertinggi untuk Pajak Reklame ditentukan yaitu senilai 25 persen.
10. Biaya tertinggi untuk Pajak Penerangan jalan ditentukan yaitu senilai 10 persen.
11. Biaya tertinggi untuk Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditentukan yaitu senilai 25 persen.
12. Biaya tertinggi untuk Pajak Parkir ditentukan yaitu senilai 30 persen.

13. Biaya tertinggi untuk Pajak Air Tanah ditentukan yaitu senilai 20 persen.
14. Biaya tertinggi untuk Pajak sarang Burung Walet ditentukan yaitu senilai 10 persen.
15. Biaya tertinggi untuk PBB perdesaan dan Perkotaan ditentukan yaitu senilai 0,3 persen.
16. Biaya tertinggi untuk BPHTB ditentukan yaitu senilai 5 persen.

2.2.5 Dasar Penetapan Pajak

Dasar penetapan pajak Provinsi yang ada sesudah diundangkannya UU Nomor 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

1. Dasar penetapan pajak Provinsi yaitu:
 - a. Pajak kendaraan bermotor ditetapkan menurut hasil kali dua bagian utama nilai jual kendaraan bermotor dan kualitas yang menggambarkan terjadinya polusi udara, rusaknya jalan karena pemakaian transportasi yang dilihat secara relatif.
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan menurut nilai jual dari kendaraan bermotor.
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan menurut nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor sebelum pengenaan pajak pertambahan nilai.
 - d. Pajak Air Permukaan ditetapkan menurut nilai dari memperoleh air.
 - e. Pajak Rokok ditetapkan atas cukai yang telah diatur oleh pemerintahan pusat terhadap rokok.

2. Dasar Penetapan pajak Kabupaten atau Kota yaitu:
 - a. Pajak Hotel ditetapkan berdasarkan total yang harus dibayar pada pihak hotel.
 - b. Pajak Restoran ditetapkan menurut total pelunasan yang diperoleh dari pihak Restoran.
 - c. Pajak Hiburan ditetapkan menurut sejumlah uang yang didapat dari penyelenggara hiburan.
 - d. Pajak Reklame ditetapkan berdasarkan dari harga penyewaan reklame.
 - e. Pajak Penerangan Jalan ditetapkan berdasarkan harga penjualan dari tenaga listrik.
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan berdasarkan harga penjualan hasil pengambilan mineral bukan logam/batuan.
 - g. Pajak Parkir ditetapkan berdasarkan total bayar yang harusnya terhadap pengelola lahan parkir
 - h. Pajak Air Tanah ditetapkan berdasarkan nilai perolehan air tanah.
 - i. Pajak Sarang Burung walet ditetapkan berdasarkan harga penjualan sarangnya.
 - j. PBB Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan berdasarkan harga jual objek pajak (NJOP).
 - k. BPHTB ditetapkan berdasarkan nilai perolehan objek pajak (NJOP).

Dasar penetapan pajak menurut Hartati (2015) dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis diantaranya yaitu:

1. Dasar penetapan pajak Provinsi sebagai berikut:
 - a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air dikenakan terhadap setiap jenis kendaraan bermotor.
 - b. Bea balik Nama kendaraan bermotor dan kendaraan atas air ditetapkan terhadap kepemilikan kendaraan bermotor atau kendaraan atas air yang dimiliki oleh pembeli.
 - c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor dikenakan terhadap setiap macam bahan bakar yang dipakai oleh kendaraan bermotor atas air dan berlaku bagi stasiun pengisian bahan bakar umum, baik milik pemerintah ataupun swasta.
2. Dasar penetapan pajak Kabupaten atau Kota yaitu:
 - a. Pajak hotel ditetapkan karena penggunaan jasa pihak hotel yang telah disediakan.
 - b. Pajak restoran ditetapkan sebab adanya jasa dari pihak restoran yang telah diberikan.
 - c. Pajak hiburan ditetapkan terhadap setiap tempat hiburan yang ada pada setiap daerah.
 - d. Pajak reklame ditetapkan terhadap setiap jenis-jenis reklame.
 - e. Pajak penerangan Jalan ditetapkan atas penerangan jalan.
 - f. Pajak pengambilan bahan golongan C ditetapkan sebab adanya bahan galian yang di ambil yang termasuk bagian C yang berada pada daerah yang bersangkutan.
 - g. Pajak parkir dikenakan terhadap parkir yang terorganisasi sedemikian lupa.

- h. Pajak pokok dikenakan terhadap perusahaan rokok.

Dasar pengenaan pajak daerah menurut Yani (2013) dibagi menjadi dua diantaranya yaitu:

1. Dasar penetapan pajak provinsi meliputi:
 - a. Pajak kendaraan bermotor ditetapkan menurut hasil kali dua bagian utama nilai jual kendaraan bermotor dan kualitas yang menggambarkan terjadinya polusi udara, rusaknya jalan karena pemakaian transportasi yang dilihat secara relatif.
 - b. Penetapan bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air yaitu harga penjualan dari kendaraan bermotor.
 - c. Penetapan pajak bahan bakar kendaraan bermotor yaitu harga penjualan bahan bakar kendaraan bermotor.
 - d. Penetapan pajak pengambilan dan pemamfaatan air bawah tanah dan air permukaan ialah harga dari perolehan air.
2. Dasar penetapan pajak Kabupaten atau Kota terdiri atas:
 - a. Dasar penetapan pajak hotel yaitu total bayaran yang dilaksanakan pada pihak hotel.
 - b. Dasar penetapan pajak restoran yaitu total bayaran yang dilaksanakan pada pihak restoran.

- c. Dasar penetapan pajak hiburan yaitu total yang harus dibayar untuk menyaksikan ataupun atas hiburan yang telah dinikmati.
- d. Dasar penetapan pajak reklame yaitu harga penyewaan reklame.
- e. Dasar penetapan pajak penerangan jalan yaitu harga penjualan tenaga listrik.
- f. Dasar penetapan pajak pengambilan bahan galian golongan C yaitu harga [penjualan dari hasil bahan galian golongan C yang sudah diambil.
- g. Dasar penetapan pajak parkir yaitu total bayaran yang harus dibayar untuk pemakaian lahan parkir.

2.2.6 Sistem Pemungutan pajak Daerah

Ketentuan yang telah diatur pada Undang-Undang tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan yang ada di negara ini menjelaskan bahwa sistem *self Assessment* merupakan sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia sejak pembaruan tentang pajak yang terjadi pada tahun 1983. Menurut Siahaan (2016) karakter semua jenis-jenis pajak daerah tidaklah serupa. Sistem ini tak dapat diterapkan pada setiap pajak daerah. Sistem pemungutan pajak daerah saat ini menggunakan tiga macam sistem pemungutan diantaranya yaitu:

1. Pembayaran dilakukan oleh yang kena pajak. Sistem ini ialah wujud dari sistem *self assessment* yakni bentuk sistem perpajakan yang mempercayai wajib pajak dalam

hal perhitungan pajak, pembayaran, dan memberitahukan berapa pajak yang terhutang olehnya menggunakan SPTPD.

2. Ditentukan oleh kepala daerah. Bentuk sistem ini adalah wujud dari bentuk perpajakan *official assessment* adalah bentuk sistem pajak yang dibayarkan bagi mereka yang berkewajiban atas pajak setelah sebelumnya ditentukan oleh kepala daerah lewat sebuah dokumen yang dinamakan surat ketetapan pajak daerah.
3. Dikutip oleh pihak pemungutnya. Bentuk sistem ini ialah perwujudan dari bentuk *with holding* yakni bentuk pemungutan pajak yang dikutip oleh pihak pemungut pajak pada tempatnya, seperti pada PLN (Perusahaan Listrik Negara).

Menurut Resmi (2014) pungutan pajak daerah dapat dikategorikan ke dalam tiga jenis diantaranya adalah:

1. Bentuk pungutan pajak yang melimpahkan wewenang terhadap lembaga perpajakan untuk menetapkan dengan sendirinya besaran pajak yang terutang pada tiap tahun berlandaskan undang-undang tentang pajak yang ada dinamakan dengan *Official Assessment System*.
2. Bentuk pungutan pajak yang memberikan kewenangan terhadap yang kena pajak untuk menerapkan dengan sendirinya besaran pajak yang terutang pada tiap tahun

berdasarkan undang-undang tentang pajak yang ada dinamakan dengan *Self assessment system*.

3. Suatu bentuk pungutan pajak yang memberikan kewenangan pada orang lain (pihak ketiga) untuk bisa menetapkan besaran pajak yang terutang oleh yang kena pajak berdasarkan ketentuan undang-undang tentang pajak yang telah berlaku dinamakan dengan istilah *With Holding Sistem*.

Menurut Hartati (2015) sistem pemungutan pajak daerah diklasifikasikan kedalam tiga bentuk diantaranya ialah:

1. *Official Assessment System* merupakan bentuk pungutan pajak saat si wajib pajak hanya berkewajiban untuk melakukan pembayaran terhadap sejumlah pajak sementara pelaporan dan perhitungan dilaksanakan oleh pihak pemerintah.
2. *Self assessment System* merupakan bentuk pungutan yang segala sesuatunya dilakukan sendiri oleh wajib pajak mulai dari bagian pelaporan, bagian perhitungan sampai dengan bagian pembayaran.
3. *With Holding System* ialah bentuk pungutan yang tidak melibatkan pemerintah dan wajib pajak di bidang pelaporan, perhitungan dan pembayaran, tetapi dilaksanakan oleh pihak ketiga yaitu perusahaan yang melakukan pemungutan pajak secara kolektif.

2.3 Jumlah penduduk

2.3.1 Pengertian jumlah penduduk

Menurut Rasyid (2017:1) penduduk adalah orang-orang di lingkungan sebagai individu, sebuah keluarga, suatu kelompok atau kumpulan masyarakat yang bertempat tinggal di suatu daerah dalam batas bagian negara dalam jangka waktu tertentu. Penduduk merupakan sesuatu yang berhubungan dengan banyaknya, identitas, perkembangan, penyebaran, perpindahan, kemampuan, keadaan kesejahteraan yang meliputi segi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ruang lingkup kependudukan.

Menurut Mulyadi (2017:15) penduduk merupakan pencerminan kuantitas dari jumlah dan tingginya penawaran tenaga kerja. Sedangkan komposisi penduduk dilihat menurut struktur umur dan tingkat pendidikan yang mencerminkan kualitas penduduk yang ada dan mereka yang akan memasuki pasar kerja. upaya peningkatan sumber daya manusia (SDM) dapat tercermin dengan mengendalikan laju dari pertumbuhan penduduk, memperbaiki struktur umur kependudukan, dan meningkatkan tingkat pendidikan dimana wajib belajar 12 tahun sehingga diperoleh tenaga kerja yang sehat secara fisik, dan mempunyai keterampilan dengan jumlah yang dapat dikendalikan.

Menurut Bidarti (2020:1) penduduk suatu negara maupun wilayah dapat diartikan kedalam dua jenis yaitu mereka yang bermukim di sebuah wilayah dan mereka yang berdasarkan norma mempunyai hak untuk bermukim di sebuah wilayah. Jumlah

penduduk pada tiap daerah tidaklah tetap tetapi akan selalu berubah bisa meningkat ataupun menurun seiring dengan waktu. Penambahan penduduk dapat terjadi sebab terjadinya angka kelahiran dan terjadinya kematian yang tidak seimbang sebab tingginya tingkat fertilitas melebihi tingkat mortalitas. Banyaknya jumlah penduduk juga disebabkan oleh selisih angka penduduk yang masuk dan keluar suatu wilayah.

Dari tiga definisi tentang jumlah penduduk tersebut bisa diambil kesimpulan bahwasanya jumlah penduduk yaitu sekumpulan orang yang mendiami suatu wilayah yang ada pada sebuah negara dalam periode tertentu dengan tujuan untuk menetap atau bertempat tinggal dengan syarat dan peraturan yang sudah berlaku pada wilayah tersebut.

2.3.2 Kependudukan di Indonesia

Badan Pusat Statistik (2020) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berdasarkan hasil SP2020 menyebutkan bahwa kependudukan di Indonesia di bulan September 2020 sebanyak 270,2 juta jiwa, meningkat 32,56 juta jiwa daripada tahun SP2010. Menurut data BPS tahun 2010-2020 rata-rata laju pertumbuhan penduduk di Indonesia yaitu 1,25% per tahun, mortalitas dan perpindahan penduduk (migrasi). Lajunya kependudukan dari tahun ke tahun menjurus turun. Hal ini disebabkan oleh adanya sebuah peraturan dari negara agar bisa menurunkan tingkat kependudukan dengan program keluarga berencana (KB) yang resmi diberlakukan

pada tahun 1980. Sebagai negara berkembang Indonesia selalu menghadapi yang namanya jumlah penduduk yang bertambah di setiap tahun yang diperlihatkan dengan fakta dimana setiap tahunnya jumlah penduduk selalu meningkat. Dimana Provinsi dengan jumlah penduduk yang tinggi terdapat di Provinsi Jawa. Sedangkan jumlah penduduk di Provinsi lainnya berada di bawah Provinsi Jawa.

Utoyo (2009) menyebutkan sebab adanya pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat maka negara berupaya untuk menyelesaikan masalah kependudukan yang terus bertambah dengan melaksanakan beberapa program diantaranya adalah:

- a. Keluarga Berencana (KB) adalah program pemerintah untuk bisa menekan ledakan penduduk dimana program ini terdiri dari (Suami, istri, dan dua orang anak).
- b. Menetapkan umur pernikahan paling rendah untuk pernikahan pertama bagi seorang wanita usia 19 tahun sedangkan untuk pria ditetapkan usia pernikahan yang pertama pada usis 21 tahun. Hal ini dilakukan untuk bisa menekan laju pertumbuhan penduduk.
- c. Meningkatkan dan memfasilitasi pendidikan sekolah yang mengakibatkan penundaan umur pernikahan.

Meningkat atau menurunnya jumlah penduduk dari periode ke periode pada sebuah daerah disebut dengan istilah dinamika penduduk. Dinamika penduduk adalah suatu proses berubahnya variabel kependudukan yang meliputi diantaranya perubahan

jumlah penduduk, komposisi penduduk, dan persebaran penduduk sebagai akibat dari perubahan komponen pertumbuhan penduduk yang terdiri dari fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Penyebab terjadinya dinamika penduduk dapat disebabkan oleh tiga unsur utama yaitu mortalitas, fertilitas, dan migrasi (Mulyadi, 2017).

2.3.3 Komponen Pertumbuhan Penduduk

Menurut Mulyadi (2017) komponen pertumbuhan penduduk dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Fertilitas

Fertilitas merupakan keberhasilan seorang perempuan atau sekelompok perempuan melalui reproduksinya atau bisa dikatakan fertilitas adalah jumlah bayi yang dilahirkan dalam keadaan hidup. Besar atau kecilnya angka kelahiran bisa memperlihatkan cepatnya penambahan penduduk yang di sebuah wilayah.

2. Mortalitas

Kematian adalah satu dari tiga komponen yang ada pada demografi penduduk yang mampu memberikan pengaruh terhadap kependudukan. Penjelasan terkait fertilitas sangat perlu bukan hanya untuk negara tetapi juga untuk perusahaan lebih lebih bagi orang yang bekerja di segi perekonomian ataupun segi kesehatan.

3. Migrasi

Berpindahnya suatu masyarakat untuk tujuan bertempat tinggal pada sebuah wilayah ke wilayah yang lain

melalui proses administrasi yang berlaku pada sebuah negara. Dimana perpindahannya cukup lama dari suatu wilayah ke wilayah lain adalah pengertian dari migrasi.

Menurut Ajie (2008: 41) terdapat beberapa aspek yang mampu mempengaruhi pertumbuhan penduduk di suatu wilayah yaitu:

1. Fertilitas (kelahiran) adalah kemampuan seorang wanita dalam melahirkan jumlah bayi hidup. Dalam penafsirannya orang cenderung menyamakan konsep fertilitas dengan fekunditas sedangkan fertilitas adalah kemampuan biologis seorang wanita untuk melahirkan bayi hidup. Sedangkan fekunditas adalah seseorang yang tidak dapat mempunyai keturunan atau dikenal dengan istilah kemandulan.
2. Mortalitas (Kematian) adalah aspek kependudukan yang sangat penting dalam merancang suatu program di bidang kesehatan. Kematian adalah suatu keadaan dimana hilangnya semua tanda kehidupan secara lama yang bisa kapan saja terjadi sesudah terjadinya kehidupan yang lahir.
3. Migrasi adalah berpindahnya suatu masyarakat pada sebuah tempat ketempat lain. Penduduk yang datang ke wilayah yang baru dinamakan dengan imigran. Sedangkan untuk penduduk yang pindah ke wilayah yang baru dinamakan dengan emigran.

2.4 Inflasi

2.4.1 Pengertian Inflasi

Menurut Halim (2018:78) inflasi adalah suatu proses kenaikan harga-harga secara umum dan terus menerus dalam waktu yang lama. Kaitan inflasi dengan mekanisme pasar yaitu diakibatkan oleh beberapa penyebab diantaranya peningkatan konsumsi penduduk atau pendistribusian barang kurang lancar. Pada sisi lain inflasi adalah penurunan nilai mata uang secara berkelanjutan. Inflasi merupakan proses dari suatu kejadian bukan naik atau turunnya secara tingkat harga. Yakni tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Inflasi dianggap terjadi jika proses kenaikan harga terjadi secara berkelanjutan dan saling mempengaruhi.

Menurut Karya & Syamsuddin (2017:89) Inflasi merupakan suatu keadaan atau kondisi dimana meningkatnya biaya pada tiap jenis barang yang terjadi secara berkelanjutan yang terdapat pada sebuah perekonomian negara. Tingginya inflasi mampu mengguncang perekonomian yang ada pada sebuah negara. Dimana inflasi tertinggi di Indonesia pernah terjadi pada tahun 1965-1966 hingga mencapai 650% yang mengakibatkan munculnya suatu gejala di masyarakat untuk menuntut adanya harga barang yang diturunkan.

Menurut Hasyim (2016:186) inflasi merupakan salah satu komponen dari banyaknya permasalahan perekonomian dan mendapatkan pandangan dari kalangan para ekonom. Inflasi adalah fenomena di perekonomian yang memperlihatkan adanya kenaikan

harga terhadap barang secara umum yang terjadi secara berkelanjutan. Syarat terjadinya inflasi adalah adanya harga-harga yang meningkat secara umum dan proses terjadinya secara berkelanjutan. Apabila hanya satu ataupun dua macam harga barang saja yang naik belum bisa dinamakan inflasi melainkan jika naiknya inflasi tersebut mampu menyebabkan naiknya harga terhadap barang lain. Kenaikan harga barang untuk sementara seperti kenaikan harga karena musim, mendekati hari libur, bencana, dan yang lain tidak dianggap inflasi.

Dari definisi inflasi di atas dapat diambil kesimpulan bahwasanya inflasi merupakan suatu permasalahan ekonomi yang terdapat pada suatu daerah atau negara yang menunjukkan adanya kenaikan harga-harga barang secara umum yang terjadi secara berkelanjutan dalam kurun waktu tertentu. Jika hanya satu ataupun dua macam harga barang yang naik belum bisa dinamakan inflasi melainkan jika naiknya inflasi tersebut mampu menyebabkan naiknya harga terhadap barang lain. Kenaikan barang untuk sementara juga tidak dianggap inflasi.

2.4.2 Penyebab Inflasi

Menurut Prawoto (2019) penyebab terjadinya inflasi dapat dikategorikan ke dalam dua bagian, diantaranya:

- a. Inflasi Tarikan Permintaan adalah inflasi yang terjadi karena barang dan jasa yang diminta oleh masyarakat terus mengalami peningkatan secara serius yang menyebabkan

harga barang pada umumnya mengalami kenaikan seperti meningkatnya pembelanjaan dari rumah tangga atau perusahaan.

- b. Inflasi Dorongan Penawaran adalah inflasi yang terjadi karena meningkatnya ongkos produksi yang diperlihatkan dengan adanya tanda menurunnya produksi dan naiknya harga barang (meningkatnya harga barang mentah dari luar negeri dan naiknya harga bahan bakar).

Menurut Naf'an (2014) inflasi disebabkan oleh lima hal diantaranya yaitu sebagai berikut:

- a. Tekanan dari sisi penawaran

Tekanan segi penawaran bisa diakibatkan karena kemerosotan nilai tukar, efek inflasi luar negeri terutama dari negara mitra perdagangan, kenaikan harga komoditas yang ditentukan oleh pemerintahan, dan terjadinya suatu musibah serta gangguan pendistribusian.

- b. Tekanan dari sisi permintaan

Faktor-faktor yang menyebabkan inflasi permintaan adalah permintaan terhadap barang dan jasa yang tinggi dibandingkan dengan persediaannya.

- c. *Natural Inflation dan Human Error Inflation*

Inflasi alamiah adalah inflasi yang berlangsung karena terdapatnya sebab alamiah sehingga masyarakat tak mempunyai kekuatan dalam melawannya. *Human error*

Inflation adalah inflasi yang berlangsung diakibatkan oleh kesalahan oleh manusia itu sendiri.

- d. *Spiralling Inflation* yaitu inflasi yang terjadi disebabkan karena inflasi yang ada pada tahun sebelumnya.
- e. *Imported Inflation dan Domestic Inflation* yaitu inflasi yang terjadi di luar negara yang juga harus dialami oleh pemerintahan sendiri karena harus menjadi pengambil harga (Price Taker) di dalam pasar luar negeri.

Menurut Sukirno (2016) jika dilihat dari sumber penyebab terjadinya suatu inflasi, inflasi dapat diklasifikasikan ke dalam tiga jenis diantaranya:

- a. Inflasi tarikan Permintaan (*Demand pull Inflation*) yaitu bentuk inflasi yang disebabkan oleh penawaran dan permintaan barang dalam suatu perekonomian yang perkembangannya tidak seimbang.
- b. Inflasi desakan biaya adalah inflasi yang biasanya terjadi saat aktivitas perekonomian sudah memenuhi kesempatan kerja yang penuh.
- c. Inflasi di impor. Istilah inflasi impor telah menjadi terkenal sejak 1970-an ketika ekonom luar negeri ditimpa permasalahan inflasi. Asal masalahnya ialah harga minyak di tahun 1973-1974 pada negara penghasil minyak di Timur Tengah yang saat itu menjadi penghasil minyak paling besar di dunia naik menjadi tiga kali lipat.

2.4.3 Penggolongan Inflasi

Menurut Prawoto (2019) inflasi digolongkan menjadi dua yaitu berdasarkan atas besarnya laju inflasi dan berdasarkan asal inflasi yaitu sebagai berikut:

1. Penggolongan inflasi berdasarkan atas besarnya laju inflasi
Penggolongan inflasi terbagi menjadi tiga jenis yaitu sebagai berikut:

- a. Inflasi Merayap

Inflasi merayap yaitu inflasi yang dilambangkan dengan rendahnya laju inflasi yang terjadi yaitu $\leq 10\%$ per tahun.

- b. Inflasi Menengah

Inflasi menengah adalah inflasi yang berlangsung sebab terdapatnya harga yang relatif tinggi dan terjadi pada waktu yang relatif singkat yakni senilai 10% sampai 50% per tahun.

- c. Inflasi Tinggi

Inflasi tinggi yaitu inflasi yang memberikan efek buruk sebab meningkatnya harga lima hingga enam kali dibandingkan jumlah yang biasa terjadi, rumah tangga konsumen tidak mau investasikan uangnya sebab inflasi yang terjadi sangat tinggi. Hal ini dapat terjadi karena negara tengah menghadapi kerugian diperlihatkan dengan tingkat inflasi $\geq 50\%$ per tahun.

2. Penggolongan inflasi menurut asal inflasi

Menurut asalnya inflasi diklasifikasikan ke dalam dua macam diantaranya:

a. *Domestic Inflation*

Domestic Inflation ialah inflasi yang muncul di dalam negara diakibatkan oleh faktor:

- 1) Adanya peningkatan macam-macam barang yang ada di pasar yang diminta oleh masyarakat. Di segi lain meningkatnya penawaran terhadap barang tersebut tak bisa dibarengi dari segi permintaan barang tersebut.
- 2) Adanya penerbitan uang baru membantu mengatasi kerugian anggaran belanja.
- 3) Akibat harga penjualan meningkat berimbas pada meningkatnya biaya produksi produk dalam negara.

b. *Foreign Inflation*

Foreign Inflation yaitu inflasi yang asalnya dari internasional yang memiliki efek diantaranya:

- 1) Indeks Biaya Hidup secara langsung alami kenaikan sebab barang tersebut termasuk ke dalam barang impor.
- 2) Indeks harga dengan tidak langsung alami kenaikan yang disebabkan oleh biaya produksi

terhadap penggunaan teknologi maupun bahan mentah juga mengalami peningkatan.

- 3) Akibat masuknya barang dari luar negeri berimbas langsung terhadap harga yang ada dalam negeri.

Menurut Silalahi et al (2013) inflasi digolongkan menjadi dua yaitu berdasarkan keparahannya dan berdasarkan sebab musabab awal terjadi yaitu:

1. Menurut tingkat keparahannya inflasi dibagi menjadi 4 yaitu:
 - a. Ringan yaitu $\leq 10\%$ / tahun
 - b. Menengah sekitar $10\% - 30\%$ / tahun
 - c. Tinggi yaitu sekitar $30\% - 100\%$ / tahun
 - d. Hiperinflasi yaitu $\geq 100\%$ / tahun
2. Menurut asal musababnya awal berlangsungnya, inflasi bisa diklasifikasikan menjadi dua jenis diantaranya:

- a. *Demand Inflation*

Demand Inflation berlangsung sebab meningkatnya barang dan jasa yang diminta di pasar tetapi tidak diimbangi dengan penambahan terhadap penawaran barang dan jasa yang ada di pasar.

- b. *Cost Inflation*

Cost Inflation terjadi diakibatkan meningkatnya biaya produksi. Perekonomian terbuka tidak lepas dari

pengaruh aktivitas ekonomi dari negara lain seperti penetapan harga minyak internasional.

Menurut Halim (2018) inflasi dibagi menjadi dua yaitu berdasarkan asalnya dan menurut besarnya cakupan pengaruh terhadap harga yaitu:

1. Menurut asalnya inflasi diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu sebagai berikut:
 - a. Inflasi dari dalam negara ialah inflasi yang terjadi sebab menurunnya anggaran belanja yang dibayar dengan metode pencetakan uang baru dan kegagalan pasar berimbang terhadap naiknya harga pangan.
 - b. Inflasi dari luar negara adalah inflasi yang terjadi sebab biaya barang yang masuk meningkat. Hal ini ada karena ongkos produksi luar negeri juga meningkat.
2. Menurut besarnya cakupan pengaruh terhadap harga dibagi kedalam tiga yaitu sebagai berikut:
 - a. Inflasi tertutup adalah meningkatnya harga yang berlangsung hanya satu ataupun dua jenis barang saja.
 - b. Inflasi terbuka yaitu meningkatnya harga yang berlangsung pada setiap barang secara umum.
 - c. Inflasi yang tak dapat teratasi yakni apabila terjangan inflasi yang terjadi sangat hebat yang menyebabkan harga setiap waktu terus mengalami perubahan.

2.4.4 Dampak Negatif Inflasi

Menurut Prawoto (2019) akibat yang ditimbulkan inflasi dibagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut:

1. Dampak kepada penghasilan

Terdapatnya masyarakat yang diuntungkan serta ada juga yang dirugikan sebab sifatnya yang tidak merata. Mereka yang merugi diakibatkan menurunnya penghasilan asli penduduk. Mereka yang mengalami untung ialah mereka yang ahli dalam memanfaatkan keadaan inflasi saat mengalami peningkatan dengan spekulasi yang dapat membuat penduduk mengalami kerugian yang besar.

2. Dampak Efisiensi

Pola distribusi faktor-faktor produksi terutama proses produksi dapat berubah karena pengaruh inflasi. Permintaan terhadap barang-barang khusus cenderung memberikan dampak pertumbuhan yang lebih besar dibandingkan dengan barang lainnya dimana meningkatnya produksi barang bisa membuat distribusi faktor produksi yang ada menjadi berubah.

3. Dampak kepada output

Naiknya inflasi mampu menurunkan daya beli penduduk yang mengakibatkan produksi menurun ataupun output juga ikut menurun. Tetapi jika dilihat dari waktu yang singkat efek dari naiknya inflasi karena produksi yang meningkat. Situasi seperti ini sering terjadi dengan tanda

naiknya biaya barang lebih dulu baru setelah itu upah yang menjadi naik. Melalui cara ini pendapatan yang diperoleh perusahaan bisa meningkat serta dari keuntungan tersebut juga dapat menaikkan jumlah produksi barang. Dalam jangka panjang inflasi tentu membuat daya beli dari masyarakat menurun serta output juga akan menurun.

Menurut Naf'an (2014) efek yang ditimbulkan dari inflasi terbagi menjadi tiga bagian diantaranya adalah:

1. Dampak kepada penghasilan

Akibat yang ditimbulkan dari segi penghasilan adalah sifatnya yang tidak menyeluruh. Terdapat masyarakat yang mengalami untung dan ada juga yang merugi karena inflasi. Masyarakat yang mempunyai penghasilan tetap bisa dirugikan karena inflasi. Contohnya seseorang mendapatkan penghasilan yang tetap senilai Rp500.000.00 per tahun sementara laju inflasi sebesar sepuluh persen. Hal ini mengakibatkan masyarakat mengalami kerugian karena menurunnya penghasilan riil sebesar tingkat inflasi tersebut yaitu sebesar Rp50.000.00. Dan untuk masyarakat yang simpan uang dengan cara kas pasti mengalami kerugian. Para kreditur juga mengalami kerugian jika bunga pinjaman yang mereka berikan lebih kecil dari tingkat inflasi. Dan mereka yang mengalami untung sebab terdapatnya inflasi antara lain:

- a. Masyarakat yang persentase penghasilannya melebihi persentase dari laju inflasi yang ada.
- b. Masyarakat yang mempunyai harta tidak dalam bentuk uang tunai namun berbentuk seperti emas atau barang.

2. Dampak kepada Efisiensi

Inflasi mampu merubah pola dari alokasi suatu faktor produksi barang. Dimana modifikasi bisa berlangsung karena naiknya berbagai jenis barang yang diminta sehingga mampu memberikan dorongan terhadap berubahnya produksi berbagai macam barang yang menyebabkan pengalokasian faktor produksi barang jadi tidak efisiensi dan dapat mempengaruhi:

- a. Saat terjadinya inflasi maka proses produksi pada saat penggunaan faktor produksi bisa menjadi tidak efisien.
 - b. Berubahnya daya beli masyarakat akan berimbas kepada jumlah berbagai barang yang diminta oleh masyarakat.
- ## 3. Dampak kepada output.

Dalam menganalisis kedua efek di atas yaitu dampak kepada penghasilan dan dampak kepada efisiensi digunakanlah sebuah pandangan bahwasanya output adalah tetap. Ini dilaksanakan agar bisa mengetahui akibat inflasi

pada pendistribusian penghasilan dan efisiensi pada total output tertentu tersebut:

- a. Inflasi mampu mengakibatkan naiknya produksi. Biasanya keadaan inflasi yang naiknya harga barang akan mendahului kenaikan upah dan menyebabkan produsen mengalami keuntungan.
- b. Jika laju inflasi sangat tinggi akan berimbas menurunnya jumlah dari produksi yang dihasilkan. Karena menurunnya nilai mata uang berdampak kepada penduduk yang tidak menyukai uang dalam bentuk tunai yang mengakibatkan terjadinya suatu pertukaran di antara barang terhadap barang lainnya.
- c. Efek inflasi terhadap pengangguran. Sebuah usaha jika ingin memberhentikan laju inflasi yang tinggi otomatis pengangguran juga akan tercipta.
- d. Efek inflasi terhadap perkembangan perekonomian. Tingginya laju inflasi tidak akan membantu berkembangnya suatu ekonomi sebuah negara. Harga yang meningkat terus akan menyebabkan proses produksi tidak produktif.
- e. Efek inflasi terhadap kesejahteraan masyarakat
Inflasi bisa memberikan dampak terhadap individu dan juga kelompok masyarakat yaitu:
 1. Menurunkan penghasilan riil penduduk yang berpenghasilan konsisten.

2. Aset yang berwujud uang akan berkurang nilainya.
3. Memburuknya proses aset yang dibagikan.

Menurut Hasyim (2016) inflasi memiliki beberapa konsekuensi masalah bagi individu, masyarakat, dan kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Karena itulah negara selalu mencari dan melaksanakan beberapa kebijakan agar dapat mencegah serta mampu untuk menghindarinya. Tingginya inflasi tidak membantu berkembangnya suatu perekonomian. Ketika harga terus meningkat maka kegiatan produksi menjadi tidak produktif. Para investor menggunakan uangnya dengan maksud untuk spekulatif seperti pembelian perumahan dan sebagainya. Hal ini menyebabkan penginvestasian yang menguntungkan menjadi turun sehingga aktivitas ekonomi juga ikut mengalami penurunan serta pengangguran akan tercipta.

Kenaikan harga akan berdampak buruk pada perdagangan. Ekspor mengalami penurunan volume dan tidak mampu berkompetisi di pasar mancanegara. Di lain sisi harga produk di negara meningkat dan impor menjadi lebih murah. Sebab jumlah impor melebihi jumlah ekspor maka cadangan devisa akan menjadi menurun serta memburuknya neraca pembayaran. Salah satu konsekuensinya adalah inflasi cenderung mengurangi kemakmuran perorangan ataupun penduduk. Para pekerja yang bergaji tetap (pelaku ekonomi). Efek dari buruknya inflasi pada kemakmuran penduduk suatu daerah antara lain:

- a. Penurunan penghasilan riil masyarakat yang berpenghasilan konsisten.
- b. Aset yang berwujud uang akan berkurang nilainya.
- c. Semakin buruknya dalam hal pembagian aset dan memperluas lembah pendistribusian antar golongan penghasilan.

2.4.5 Cara Mengatasi Inflasi

Menurut Prawoto (2019) Banyak cara negara menyelesaikan inflasi, dapat berbeda-beda sebab pemicu terjadinya pada tiap-tiap negara tidaklah sama. Metode dalam mengatasinya bisa dilaksanakan dengan menerapkan suatu kebijakan diantaranya:

1. Kebijakan Moneter

Tujuan dari kebijakan moneter adalah untuk lebih fokus pada total peredaran uang. Inflasi dikendalikan oleh Bank Sentral dengan cara meningkatkan cadangan minimum agar jumlah uang yang beredar menjadi lebih kecil sehingga tingkat inflasi mampu untuk ditekan. Bank Indonesia (BI) mengelola inflasi saat ini melalui metode pengelolaan yang disebut *Inflation Targeting Framework* (ITF) yang menentukan tingkat suku bunga BI Rate yang ditetapkan setiap awal bulan.

2. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal meliputi segi pengeluaran negara dan pajak yang secara langsung bisa mempengaruhi suatu harga, terkait peraturan mengenai pengeluaran pemerintahan

negara, mengurangi permintaan total dan menekan laju inflasi merupakan kebijakan fiskal yang diterapkan.

3. Kebijakan yang berhubungan dengan output

Total output yang selalu naik dapat dicapai karena ada sebuah kebijakan yang mampu membuat bea masuk turun yang mengakibatkan biaya impor meningkat dan biaya barang jadi menurun. Sehingga naiknya output mampu memperlambat lajunya Inflasi. Operasi pasar terbuka adalah sebuah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dalam jangka pendek yaitu lewat lembaga pangan (BULOG) agar bisa menyediakan barang-barang kebutuhan yang ada.

4. Kebijakan Penetapan Harga dan *Indexing*

Terjadinya kebijakan ini sebab penentuan biaya yang tinggi untuk harga produk tertentu dan indikator ongkos untuk upah dan gaji.

Menurut Karya & Syamsudidin (2017) kebijakan pemerintah dalam mengatasi inflasi ada tiga yaitu sebagai berikut:

1. Kebijakan Fiskal (Perpajakan)

Kebijakan fiskal terdiri dari langkah-langkah pemerintah dalam melakukan kebijaksanaan dalam segi perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan tujuan memengaruhi pengeluaran *aggregate* dalam ekonomi.

2. Kebijakan keuangan

Kebijakan moneter adalah suatu kebijakan negara yang dilaksanakan lewat Bank Indonesia dengan tujuan

agar bisa mengatur peredaran uang di suatu perekonomian yang dapat memengaruhi pengeluaran aggregate.

3. Kebijakan Non-Keluaran atau segi penawaran

Kebijakan fiskal dan moneter lebih berfokus dalam hal mengendalikan pengeluaran agregate. Oleh sebab itu kebijakan fiskal dan moneter disebut juga kebijakan sisi permintaan. Sedangkan non-moneter lebih ditekankan pada kebijakan sisi penawaran yang tujuannya ialah untuk meninggikan efisien aktivitas suatu perusahaan supaya mampu melakukan penawaran terhadap produknya dengan harga yang lebih terjangkau dan kualitas yang juga bagus.

2.5 Pengaruh Antar Variabel

2.5.1 Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Penerimaan

Pajak Daerah

Bertambahnya jumlah penduduk pada sebuah wilayah bisa mempengaruhi pajak yang diterima oleh daerah sebab seiring dengan jumlah penduduk yang bertambah di sebuah wilayah dapat membuat jumlah wajib pajak pada suatu daerah mengalami peningkatan sehingga nantinya pajak yang diterima daerah juga mengalami peningkatan. Sebab adanya penambahan jumlah penduduk yang ada di suatu wilayah mampu memberikan dampak terhadap pajak yang diterima daerah secara langsung (Saputra, Sudjana & Djudi, 2014).

Bertambahnya suatu penduduk yang ada pada suatu wilayah tidak dapat dikatakan selalu menjadi suatu penghalang terhadap

berlangsungnya pembangunan perekonomian sebab masyarakat mempunyai dua kontribusi. Dilihat dari sisi permintaan masyarakat sebagai seorang konsumen dan menurut sisi penawaran masyarakat sebagai seorang produsen. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa meningkatnya jumlah masyarakat (penduduk) tidak hanya sebagai penghalang dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi. Apabila masyarakat memiliki kemampuan yang tinggi dalam menghasilkan serta dan menyerapi hasil output produksi. Hal ini menunjukkan tingginya tingkat pertumbuhan penduduk juga di imbangi dengan taraf pendapatan yang tinggi juga. Dari deskripsi di atas menunjukkan bahwa meningkatnya jumlah penduduk dapat mempengaruhi besarnya jumlah dari wajib pajak untuk membayar pajak daerah (Nurrohman, 2010).

Pembangunan ekonomi pada sebuah wilayah dapat disebabkan oleh faktor jumlah penduduk baik tinggi maupun dalam jumlah rendah. Jika sebuah daerah mempunyai penduduk yang tinggi maka proses pembangunan daerah bisa dilaksanakan lebih cepat tetapi jika sebuah wilayah mempunyai penduduk yang rendah maka pembangunan wilayah juga menjadi lama dalam pelaksanaannya. Apabila pembangunan di sebuah wilayah berjalan cepat maka pajak yang di terima wilayah menjadi besar sebab masyarakat mengetahui bahwa pajak yang diterima pada sebuah wilayah ditujukan untuk membiayai kebijakan dan pembangunan daerah di masa yang akan datang (Prasetyo, 2016).

2.5.2 Pengaruh Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak daerah

Peningkatan penghasilan penduduk juga harus dibarengi dalam hal penyediaan barang dan jasa. Apabila harga untuk barang serta jasa meningkat secara berkelanjutan maka mengakibatkan terjadinya inflasi. Hal ini bisa berimbas langsung terhadap keadaan ekonomi sebuah negara serta bisa menurunkan kesadaran dari wajib pajak untuk membayar pajak (Saputra, Sudjana & Djudi, 2014). Dari situasi ini negara di minta untuk dapat menstabilkan ekonomi yang ada pada sebuah wilayah atau negara dengan cara inflasi harus tetap terjaga di tingkat yang kecil/rendah supaya nantinya pajak daerah yang diterima bisa lebih maksimal.

Menurut Nurrohman (2010) inflasi memiliki efek yang besar pada perekonomian sebuah negara. Adanya inflasi akan berimbas terhadap penurunan daya beli penduduk dan mengakibatkan naiknya tarif produksi perusahaan. Naiknya tarif produksi mampu mengakibatkan berkurangnya pendapatan yang di peroleh oleh perusahaan. Sebab pendapatan yang diterima perusahaan berkurang otomatis pajak yang diterima dan sudah di punggut oleh pemerintah pada perusahaan itu juga berkurang. Tingkat inflasi sangat mempengaruhi pajak daerah yang diterima sebab jika inflasi naik maka pajak yang diterima daerah akan menurun.

2.6 Penelitian Terkait

Penelitian terkait merupakan salah satu panduan peneliti saat melaksanakan penelitian serta menetapkan proses-proses yang teratur dalam penyusunan baik itu dari segi teorinya maupun dari segi konsepnya. Di bawah ini merupakan penelitian terkait yang berhubungan dengan tema penelitian ini, diantaranya adalah:

Tabel 2.1
Penelitian Terkait

No	Penelitian dan Judul	Metode Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Aji (2021) Faktor-faktor yang mempengaruhi pajak daerah Kota Semarang	Model Regresi Linear Berganda dengan metode kuadrat terkecil	Hasil penelitian yaitu PDRB dan Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pajak Daerah. Jumlah Industri dan Kepadatan Penduduk berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pajak Daerah. Secara bersama sama PDRB, inflasi, jumlah industri, dan kepadatan penduduk berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Daerah di kota Semarang.	Variabel Independen: Inflasi dan kepadatan penduduk	Variabel Independen: Jumlah Industri dan PDRB

Tabel 2.1
Lanjutan

2	Kadafi, Mersa, dan Putri (2020) Deter minan penerima an pajak daerah di Kota Sama rinda	Metode Regresi linear ber ganda	Hasil penelitian secara parsial PDRB, Jumlah Penduduk dan Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah, Secara simultan (PDRB), jumlah penduduk inflasi berpengaruh signifikan terhadap pajak daerah di Kota Samarinda.	Variabel Independen: Jumlah Penduduk dan Inflasi	Variabel Independen: (PDRB)
3	Lumy, Kindange n, Daisy, dan Engka. (2018) Analisis Faktor faktor yang mempeng aruhi penerimaa n pajak daerah pada pemerinta han Provinsi di Sulawesi Utara	Metode regresi linear ber ganda.	Hasil penelitian yaitu Jumlah Penduduk dan Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. PDRB berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah.	Variabel Independen: Inflasi dan Kepadatan penduduk	Variabel Independen: PDRB

Tabel 2.1
Lanjutan

4	Saputra (2018) Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah di Kota Cilegon	Metode OLS (Ordinary Least Square)	PDRB dan Jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak Daerah, inflasi dan jumlah industri tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Cilegon.	Variabel Independen: Jumlah Penduduk dan Inflasi	Variabel Independen: (PDRB) dan jumlah industri
5	Sania, Yunita dan Muttaqin (2018) Pengaruh jumlah penduduk, produk domestik regional bruto dan inflasi terhadap penerimaan pajak daerah pada Kabupaten dan Kota di Jawa tengah	Analisis Regresi Linear Berganda	Jumlah penduduk, PDRB dan inflasi secara simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. jumlah penduduk dan PDRB berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah, PDRB Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.	Variabel Independen: Jumlah Penduduk dan Inflasi	Variabel Independen: (PDRB)

Tabel 2.1
Lanjutan

6	Sari dan Ilyas (2016) Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak di Provinsi Bengkulu	Model regresi berganda	Pendapatan berpengaruh positif terhadap pajak daerah di Bengkulu. Jumlah penduduk tidak berpengaruh positif terhadap pajak daerah di Bengkulu. Inflasi tidak berpengaruh negatif terhadap pajak daerah di Bengkulu.	Variabel Independen: Jumlah Penduduk dan Inflasi	Variabel Independen: PDRB
7	Prasetyo (2016) Analisis pengaruh jumlah penduduk inflasi dan PDRB terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten dan Kota Jawa Tengah (Tahun 2011-2014)	Metode Analisis Regresi Ber ganda	Jumlah penduduk berpengaruh positif tidak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah, PDRB harga konstan dan tingkat inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah.	Variabel Independen: Jumlah Penduduk dan Inflasi	Variabel Independen: (PDRB)

Tabel 2.1
Lanjutan

8	Putri (2013) Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak	Regresi Ber ganda dengan Metode Ordinary Least Square (OLS).	Secara simultan jumlah penduduk, pendapatan per kapita, inflasi dan jumlah surat ijin usaha Perdagangan berpengaruh terhadap penerimaan pajak reklame. Secara parsial Pendapatan per kapita dan jumlah surat ijin usaha berpengaruh signifikan positif, sedangkan inflasi berpengaruh signifikan negatif dan jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak reklame.	Variabel Independen: Jumlah Penduduk dan Inflasi	Variabel Independen: Pendapatan Perkapita dan Jumlah surat Ijin usaha Perdagangan. Variabel dependent: Pajak Reklame
---	--	--	---	---	---

Tabel 2.1
Lanjutan

9	Hanis (2013) Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah Kota Tegal	Analisis Regresi Ber ganda	Wajib pajak, pendapatan perkapita, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Kota Tegal, inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Kota Tegal.	Variabel Independen: Inflasi	Variabel Independen: Wajib pajak, pendapatan Perkapita, dan pertumbuhan ekonomi.
10	Nurrohm an (2010) Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah di Kota Suara karta (Tahun 1994-2007)	Model Regresi Linier Ber ganda	Secara uji T PDRB pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah kota Surakarta Sedangkan inflasi dan jumlah penduduk tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Kota Surakarta tahun 1994-2007.	Variabel Independen: Jumlah Penduduk dan Inflasi	Variabel Inde penden: (PDRB)

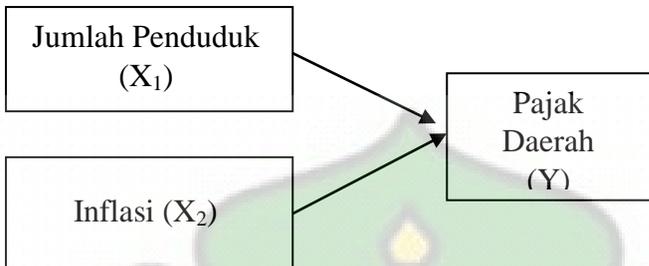
Sumber: Olahan Sendiri (2021).

2.7 Kerangka Pemikiran

Kerangka pikir adalah sebuah dasar pemikiran yang berbentuk diagram yang bertujuan memberikan penjelasan secara lebih jelas terhadap penelitian yang ingin dilaksanakan. Biasanya kerangka pikir dilakukan menurut pertanyaan penelitian dan menampilkan adanya suatu kaitan dari variabel bebas terhadap

Menurut Lumy, Kindangen, Daisy & Engka (2018) PDRB, jumlah penduduk mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak yang diterima daerah. Hal ini sinkron dengan konsep yang mengatakan terdapatnya kaitan yang positif antara jumlah penduduk dengan pajak daerah. Yakni, jika terdapatnya penambahan kependudukan maka akan berdampak terhadap meningkatnya pajak daerah yang diterima (*ceteris paribus*). PDRB mempunyai pengaruh yang positif. Sinkron dengan konsep yang mengatakan terdapat kaitan yang positif antara PDRB dengan pajak daerah. Yakni jika PDRB mengakibatkan pajak yang diterima daerah juga naik (*ceteris paribus*). Inflasi mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pajak yang diterima daerah. Yakni jika inflasi naik maka pajak yang diterima daerah juga ikut naik (*ceteris paribus*). Dalam penelitian ini saya ingin melihat bagaimana hubungan pengaruh antara jumlah penduduk dan inflasi terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi Aceh.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



2.8 Hipotesis Penelitian

Dugaan awal pada sebuah penelitian apakah betul atau salah yang dilihat berdasarkan hasil dari analisis penelitian yang telah dilakukan adalah definisi dari hipotesis penelitian. Dugaan awal yang ada pada penelitian ini yaitu:

- Ho1 : Jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah.
- Ha1 : Jumlah penduduk berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah.
- Ho2 : Inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah.
- Ha2 : Inflasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah.
- Ho3 : Jumlah penduduk dan Inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah.
- Ha3 : Jumlah Penduduk dan Inflasi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian kuantitatif (*quantitative research*). Penelitian ini menjelaskan hubungan di antara variabel bebas berupa jumlah penduduk dan inflasi dengan variabel terikat berupa penerimaan pajak daerah. Penelitian kuantitatif dapat diartikan sebuah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, yang bertujuan untuk meneliti suatu populasi atau sampel, data dikumpulkan menggunakan instrument penelitian, analisis data sifatnya statistik/kuantitatif, yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang sudah ditentukan (Sugiyono, 2017).

Berdasarkan pada rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini. Penelitian menggunakan pendekatan asosiatif. Rumusan masalah Assosiatif yaitu rumusan masalah dalam penelitian yang sifatnya mempertanyakan kaitan di antara dua variabel atau lebih (sugiyono, 2017). Dengan menggunakan hubungan kausal yaitu hubungan yang sifatnya sebab akibat. (Sugiyono, 2017).

3.2 Jenis dan Sumber data

Data yang dipakai pada penelitian ini merupakan data sekunder yaitu data *time series* dari tahun 1990-2020. Menurut Sugiyono (2017) data sekunder merupakan data yang didapatkan

dan dikumpulkan melalui sumber yang berada di luar organisasi seperti publikasi pemerintah, buku dan majalah. Data dalam penelitian ini didapatkan dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan & Kemenkeu Indonesia, DJP Aceh dan BPS Provinsi Aceh. Data *time series* yang dipakai dalam penelitian ini yaitu:

- a. Data pajak daerah tahun 1990-2020 Provinsi Aceh yang bersumber dari Kanwil DJP Aceh dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).
- b. Data inflasi tahun 1990-2020 yang bersumber dari BPS (Badan Pusat Statistik) Provinsi Aceh.
- c. Data jumlah penduduk tahun 1990-2020 yang bersumber dari BPS (Badan Pusat Statistik) Provinsi Aceh.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian sebab tujuan utama dari penelitian yaitu mendapatkan data (Sugiyono, 2017). Data yang ada dalam penelitian ini didapatkan lewat teknik kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan metode membaca dan mengumpulkan teori yang bersumber dari buku literatur, laporan tahunan, hasil penelitian terdahulu serta data yang bersumber dari BPS, Aceh Dalam Angka dan Direktorat Jenderal perimbangan Keuangan.

3.4 Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditentukan oleh penulis untuk dipelajari sehingga

memperoleh informasi mengenai hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (sugiyono, 2017).

3.4.1 Variabel dependen

Variabel terikat adalah variabel yang di pengaruhi atau yang menjadi akibat sebab adanya variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Penerimaan Pajak Daerah (Y)

3.4.2 Variabel Independen

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel independent yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jumlah Penduduk (X_1) dan Inflasi (X_2).

3.5 Definisi dan Operasional Variabel

Berdasarkan hasil identifikasi variabel di atas, selanjutnya dapat diuraikan definisi operasional variabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Definisi dan Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi	Satuan Ukur
1	Jumlah Penduduk (X_1)	Menurut Said (2012) jumlah penduduk ialah sekelompok masyarakat yang mendiami suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan bentuk keberhasilan dari proses demografi diantaranya yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi.	Ribu Jiwa

Tabel 3.1
Lanjutan

2	Inflasi (X ₂)	Karya dan Syamsuddin (2016) Inflasi yaitu sebuah keadaan atau kondisi dimana meningkatnya harga pada setiap barang secara berkelanjutan yang berlangsung di sebuah perekonomian tertentu.	Persen (%)
3	Pajak Daerah (Y)	Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dikatakan bahwasanya pajak daerah yaitu kontribusi wajib pajak terhadap daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa menurut Undang Undang dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung yang hasil perolehan pajak tersebut digunakan untuk kepentingan di daerah dan kepentingan masyarakat.	Rupiah (Rp)

Sumber: Data Diolah (2021).

3.6 Model Penelitian

Model regresi linear berganda merupakan model penelitian yang dipakai dalam penelitian ini. Dimana model regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independent (X₁, X₂...X_n) dengan variabel terikat (Y).

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \dots + e \dots\dots\dots(3.1)$$

Keterangan:

Y = Pajak daerah

X_1 = Jumlah Penduduk

X_2 = Inflasi

E = error

B_1, B_2 = Koefisien Regresi

3.7 Teknik Analisis data

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yaitu analisis regresi linear berganda (*Multiple Regression Analysis*) dimana data yang digunakan adalah data deret waktu (data time series) yaitu data dari tahun 1990-2020. Analisis data adalah sebuah bentuk penyederhanaan data menjadi bentuk yang lebih mudah untuk dibaca, dipahami, dan dijelaskan. Analisis yang terdapat di penelitian ini bertujuan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang terdapat di rumusan masalah dengan menggunakan sebuah program komputer yang bernama Eviews. Untuk menganalisis data digunakan metode yaitu sebagai berikut:

3.7.1 Asumsi klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah terdapat masalah pada data regresi. Uji asumsi klasik yang digunakan yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel bebas (x) terhadap variabel terikat (y), maka peneliti memakai analisis regresi untuk membandingkan kedua variabel tersebut. Untuk mendapatkan model regresi maka peneliti menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Uji Normalitas

Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Cara yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode kolmogorovsmirnov yang bertujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan normal atau tidak. Uji kolmogorovsmirnov yaitu uji bed antara data yang di uji normalitasnya dengan data normal baku.

- a. Apabila Signifikansi $> 0,05$ maka data terdistribusi normal.
- b. Apabila Signifikansi $< 0,05$ maka data tidak terdistribusi normal (Sujarweni, 2015).

2. Uji Multikolinearitas

Tujuan uji Multikolinearitas adalah untuk menguji model regresi apakah terdapat hubungan di antara variabel bebas. Apabila variabel bebas saling berkorelasi maka variabel ini tidak ortogonal. Variabel orthogonal yaitu variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel independen dengan nol (Ghozali, 2013). Untuk mengambil keputusan dalam uji multikolinearitas didasarkan atas:

- a. Apabila nilai Tolerance lebih besar dari $> 0,10$ maka tidak terjadi multikolinearitas.
- b. Apabila nilai tolerance lebih kecil dari $< 0,10$ maka terjadi multikolinearitas.

Melihat nilai VIF (Variance Inflation faktor) adalah

- a. Apabila nilai VIF $< 10,00$ maka tidak terjadi multikolinearitas.
- b. Apabila nilai VIF $> 10,00$ maka terjadi multikolinearitas (Umar, 2014).

3. Uji heteroskedastisitas

Tujuan uji heteroskedastisitas yaitu untuk menguji model regresi apakah terjadinya ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dan residual satu pengamatan ke pengamatan lain konsisten/tetap dinamakan Homoskedastisitas dan jika berbeda dinamakan Heteroskedastisitas (Ghozali, 2013). Dasar pengambilan keputusan dalam uji heterokedastisitas adalah:

- a. Apabila nilai signifikansi $> 0,05$ artinya tidak terjadi masalah uji heterokedastistias.
- b. Apabila nilai signifikansi $< 0,05$ artinya terjadi masalah heterokedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Tujuan uji autokorelasi untuk mengetahui apakah sebuah model regresi linear terdapat hubungan antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ sebelumnya. Terjadinya autokorelasi disebabkan penelitian yang beruntun setiap

tahunnyayang berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Autokorelasi biasanya dijumpai pada data deret waktu (Ghozali, 2013). Untuk mengambil keputusan dalam uji autokorelasi bisa dilakukan dengan cara melihat nilai pada prob F atau $Chi Square < 0,05$ yang berarti terdapat gejala autokorelasi.

3.8 Pengujian hipotesis

Tujuan uji hipotesis adalah untuk menguji dan mengetahui apakah kesimpulan pada sampel dapat berlaku untuk populasi. Untuk mendapatkan kesimpulan dari analisis maka lebih dahulu dilaksanakan suatu pengujian hipotesis yang dilakukan secara simultan atau menyeluruh (uji F) dan secara parsial/uji sendirinya (uji T) yang dapat dipaparkan dibawah ini:

3.8.1 Uji F (Uji Simultan)

Pengujian secara bersama-sama dilakukan untuk melihat apakah setiap variabel bebas yang terdapat dalam penelitian secara simultan mempunyai pengaruh pada variabel terikat, maka dilaksanakan uji koefisien regresi dengan cara bersama sama. Untuk mengetahui hasil dari uji Simultan (Uji F) maka digunakan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : Semua variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.

H_a : Semua variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat.

Pengambilan keputusan didasarkan atas:

1. Apabila nilai prob (signifikansi) $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
2. Apabila nilai prob (signifikansi) $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

3.8.2 Uji T (Uji Parsial)

Uji T dilakukan untuk menguji apakah terdapat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Untuk mengetahui signifikansi terhadap variabel tergantung atau tidak maka pengujian dilakukan lewat nilai t hitung. Variabel akan memiliki pengaruh apabila mempunyai nilai prob di setiap variabel (prob. < 0.05) lebih kecil dari konstanta.

Untuk mengetahui hasil dari uji parsial (Uji T) digunakan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : Masing-masing variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.

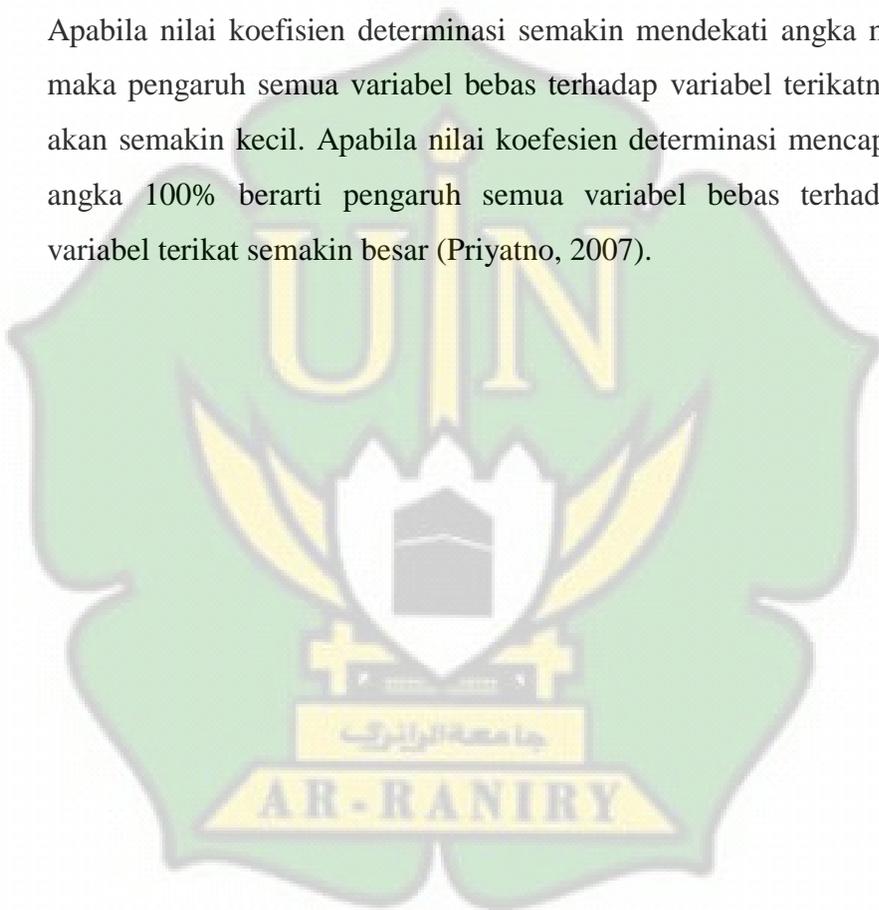
H_a : Masing-masing variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat.

Pengambilan keputusan didasarkan atas:

1. Apabila nilai prob (signifikansi) $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.
2. Apabila nilai prob (signifikansi) $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

3.9 Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi dilakukan untuk menilai berapa besar pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Koefisien determinasi dinyatakan dalam bentuk persentase (%). Apabila nilai koefisien determinasi semakin mendekati angka nol maka pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikatnya akan semakin kecil. Apabila nilai koefisien determinasi mencapai angka 100% berarti pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikat semakin besar (Priyatno, 2007).



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Aceh adalah salah satu Provinsi yang ada di Indonesia dan beribukota di Banda Aceh. Aceh menempati bagian barat pulau Sumatera dan Provinsi paling barat negara Indonesia. Secara geografis Aceh terletak antara 2°6° Lintang Utara dan 95°98° Lintang Selatan. Dengan ketinggian rata-rata di atas permukaan laut 125 meter. Aceh berbatasan dengan Selat Malaka di sebelah utara dan timur, Sumatera Utara di sebelah selatan, dan Samudera Hindia di sebelah barat. Aceh merupakan salah satu wilayah yang memperoleh status sebagai daerah istimewa di Indonesia, dan Aceh juga memiliki kewenangan yaitu otonomi khusus.

Gambar 4.1
Peta Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh



Sumber: Badan pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (2021).

Kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh terdiri dari Kabupaten Simeulue, kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Bireun, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Naganraya, Kabupaten Aceh jaya, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Pidie Jaya, Kota Banda Aceh, Kota sabang, Kota Langsa, Kota Lhoksumawe, Kota Subulussalam. Menurut Badan Pusat Statistik Aceh (2020) jumlah penduduk di Provinsi Aceh sebesar 5.459.891 jiwa. Berikut adalah tabel Jumlah Penduduk yang terdapat di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh:

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di
Provinsi Aceh Tahun 2020

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	Kab. Simeulue	93.990
2	Kab. Aceh Singkil	126.512
3	Kab. Aceh Selatan	240.820
4	Kab. Aceh Tenggara	220.402
5	Kab. Aceh Timur	444.829
6	Kab. Aceh Tengah	216.368
7	Kab. Aceh Barat	213.997
8	Kab. Aceh Besar	433.528
9	Kab. Pidie	450.765
10	Kab. Bireun	480.322
11	Kab. Aceh Utara	627.265

Tabel 4.1
Lanjutan

12	Kab. Aceh Barat Daya	152.483
13	Kab. Gaya Lues	95.729
14	Kab. Aceh Tamiang	298.586
15	Kab. Nagan Raya	170.098
16	Kab. Aceh Jaya	94.491
17	Kab. Bener meriah	150.903
18	Kab. Pidie jaya	164.311
19	Kota Banda Aceh	276.304
20	Kota sabang	35.398
21	Kota Langsa	179.277
22	Kota Lhoksumawe	211.123
23	Kota Subulussalam	82.390
Jumlah		5.459.891

Sumber: BPS Aceh 2021.

4.2 Gambaran Umum Variabel Penelitian

Menurut Yani (2013:52) pajak daerah adalah iuran wajib yang harus dilakukan individu ataupun sebuah lembaga kepada wilayah dengan tidak mengharap kompensasi saat itu secara seimbang serta dapat dipaksa menurut ketentuan undang undang yang ada dan berguna dalam pembiayaan saat menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pajak daerah merupakan pendapatan asli di daerah dan harus jadi sumber pendanaan saat menyelenggarakan urusan pemerintah dan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan penduduk. Dengan begitu suatu daerah dapat menjalankan otonomi daerahnya misalnya mampu dalam hal mengatur urusan rumah tangga daerahnya sendiri.

Tabel 4.2
Pajak Daerah di Provinsi Aceh 2016-2020

No	Tahun	Pajak Daerah (Rp)
1	2016	1.252.750.000.000
2	2017	1.315.393.895.060
3	2018	1.309.081.813.533
4	2019	1.409.251.915.061
5	2020	1.477.991.066.970

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2021).

Dari Tabel 4.2 di atas dapat dilihat bahwa penerimaan pajak daerah tertinggi dalam lima tahun terakhir terjadi pada tahun 2020 dimana besarnya penerimaan pajak daerah yaitu sebesar Rp1.477.991.066.970 dan angka penerimaan pajak daerah terendah dalam lima tahun terakhir terjadi pada tahun 2016 dimana besarnya penerimaan pajak daerah yaitu sebesar Rp1.252.750.000.000.

Menurut Bidarti (2020:1) penduduk suatu negara maupun wilayah dapat diartikan kedalam dua jenis yaitu mereka yang bermukim di sebuah wilayah dan mereka yang berdasarkan norma mempunyai hak untuk bermukim di sebuah wilayah. Jumlah penduduk pada tiap daerah tidaklah tetap tetapi akan selalu berubah bisa meningkat ataupun menurun seiring dengan waktu. Penambahan penduduk dapat terjadi sebab terjadinya angka kelahiran dan terjadinya kematian yang tidak seimbang sebab tingginya tingkat fertilitas melebihi tingkat mortalitas. Banyaknya

jumlah penduduk juga disebabkan oleh selisih angka penduduk yang masuk dan keluar suatu wilayah.

Tabel 4.3
Jumlah penduduk (Jiwa) Provinsi Aceh
2016-2020

No	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	2016	5.096.248.00
2	2017	5.189.466.00
3	2018	5.281.314.00
4	2019	5.371.532.00
5	2020	5.459.891.00

Sumber: Badan Pusat Statisti Aceh (2021).

Tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa kepadudukan tertinggi Provinsi Aceh dalam lima tahun terakhir terjadi pada tahun 2020, dimana besarnya jumlah penduduk yaitu sebesar 5.459.891.00 jiwa. Dan jumlah penduduk terendah Provinsi Aceh dalam lima tahun terakhir terjadi pada tahun 2016 dimana besarnya jumlah penduduk yaitu sebesar 5.096.248.00 jiwa.

Menurut Hasyim (2016:186) inflasi merupakan suatu komponen dari banyaknya permasalahan perekonomian dan mendapatkan pandangan dari kalangan para ekonom. Inflasi adalah fenomena di perekonomian yang memperlihatkan adanya kenaikan harga terhadap barang secara umum yang terjadi secara berkelanjutan. Syarat terjadinya inflasi adalah adanya kenaikan harga-harga secara umum dan proses terjadinya secara

berkelanjutan. Apabila hanya satu ataupun dua macam harga barang saja yang naik belum bisa dinamakan inflasi melainkan jika naiknya inflasi tersebut mampu menyebabkan naiknya harga terhadap barang lain. Kenaikan harga barang untuk sementara seperti kenaikan harga karena musim, mendekati hari libur, bencana, dan yang lain tidak dianggap inflasi.

Tabel 4.4
Pertumbuhan Inflasi Tahun Provinsi Aceh 2016-2020

No	Tahun	Inflasi (%)
1	2016	3.95
2	2017	4.25
3	2018	1.84
4	2019	1.69
5	2020	3.59

Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh (2021).

Tabel 4.4 di atas menunjukkan inflasi tertinggi yang terjadi di Provinsi Aceh dalam lima tahun terakhir terjadi di tahun 2016 dimana tingginya inflasi yaitu sebesar 3.95%, dan inflasi terendah dalam lima tahun terakhir terjadi pada tahun 2019 dimana besarnya inflasi yaitu sebesar 1.69%.

4.3 Uji Asumsi Klasik

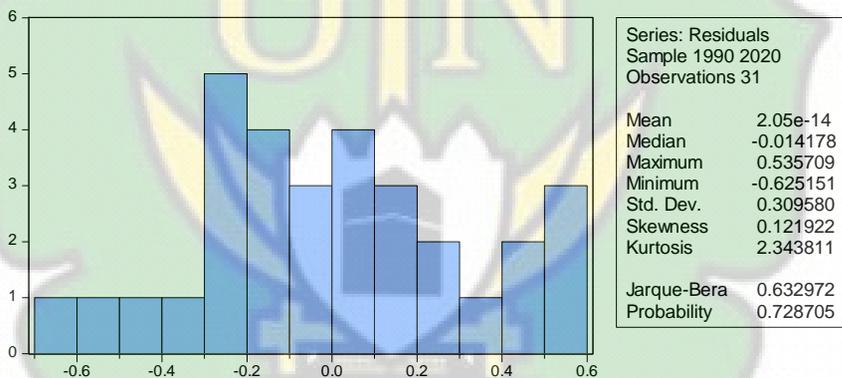
Uji Asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Dimana pengujian dilaksanakan untuk mengetahui terdapat atau

tidaknya pengaruh dari jumlah penduduk dan inflasi terhadap penerimaan pajak daerah.

4.3.1 Uji Normalitas

Tujuan dari uji normalitas adalah untuk menguji dan mengetahui apakah pada model regresi variabel bebas dan variabel terikat keduanya terdistribusi normal atau tidak. Dimana model regresi yang benar yaitu memiliki distribusi yang normal atau mendekati normal.

Gambar 4.2
Hasil Uji Normalitas



Sumber: Olahan Eviews (2021).

Pengambilan keputusan dalam uji Normalitas didasarkan atas:

1. Apabila nilai signifikansi $> 0,05$ maka nilai residual berdistribusi normal.
2. Apabila nilai signifikansi $< 0,05$ maka nilai residual tidak berdistribusi normal.

Berdasarkan gambar 4.2 diatas, bisa ditarik kesimpulan bahwasanya nilai jarque Bera sebesar 0,632972 dengan p Value atau Probability sebesar 0,728705 dimana $> 0,05$ yang berarti maka residual berdistribusi normal.

4.3.2 Uji Multikolinearitas

Tujuan uji Multikolinearitas adalah untuk menguji model regresi apakah terdapat hubungan di antara variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat adanya korelasi di antara variabel bebas.

Tabel 4.5
Hasil Uji Multikolinearitas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	57.61900	17394.78	NA
LOG (X ₁)	1.292021	17159.10	1.245987
LOG (X ₂)	0.021764	5.216942	1.245987

Sumber: Olahan Eviews (2021).

Pengambilan keputusan dalam uji multikolinearitas didasarkan dengan melihat nilai dari VIF (*Variance Inflation Factor*):

1. Apabila nilai $VIF < 10,00$ maka tidak terjadi multikolinearitas.
2. Apabila nilai $VIF > 10,00$ maka terjadi multikolinearitas.

Berdasarkan tabel 4.5 di atas dapat ditarik kesimpulan nilai Centerad VIF untuk X_1 dan X_2 yaitu sebesar 1.245987 dimana nilai tersebut kurang dari 10. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas pada model prediksi.

4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Tujuan uji heteroskedastisitas yaitu untuk menguji model regresi apakah terjadinya ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dan residual satu pengamatan ke pengamatan lain konsisten/tetap dinamakan Homoskedastisitas dan jika berbeda maka dinamakan Heteroskedastisitas.

Tabel 4.6
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic	2.954565	Prob. F(2,28)	0.0685
Obs*R-squared	5.402174	Prob. Chi-Square(2)	0.0671
Scaled explained SS	2.961212	Prob. Chi-Square(2)	0.2275

Sumber: Olahan Eviews (2021).

Pengambilan keputusan dalam uji Heteroskedastisitas didasarkan atas:

1. Apabila nilai signifikansi $> 0,05$ berarti tidak terdapat masalah Heteroskedastisitas.

2. Apabila nilai signifikansi $< 0,05$ berarti terjadi masalah Heteroskedastisitas.

Berdasarkan tabel 4.6 di atas bisa disimpulkan bahwasanya nilai P Value yang diperlihatkan pada nilai prob. Chi Square (2) Obs*R-Square yaitu sebesar 0,0671. Nilai P Value $0,0671 > 0,05$ maka dalam model regresi tidak terdapat masalah dalam uji Heteroskedastisitas.

4.3.4 Uji Autokorelasi

Tujuan uji autokorelasi untuk mengetahui apakah sebuah model regresi linear terdapat hubungan antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ sebelumnya. Untuk mengambil keputusan dalam uji Autokorelasi bisa dilakukan dengan cara melihat nilai pada prob F atau *Chi Square* maka terjadi gejala Autokorelasi.

Tabel 4.7
Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	0.154559	Prob. F(2,25)	0.8576
Obs*R-squared	0.366411	Prob. Chi-Square(2)	0.8326

Sumber: Olahan Eviews (2021).

Berdasarkan tabel 4.7 di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa P Value Uji *Breusch-Godfrey Serial Correlation Lm*, yaitu sebesar 0,08326. Dimana nilai $0,8326 > 0,05$ yang berarti tidak terdapat masalah pada uji Autokorelasi.

4.4 Teknik Analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yaitu analisis regresi linear berganda. Pengolahan data menggunakan bantuan sebuah program yaitu Eviews 9. Pengolahan data juga menggunakan data deret waktu (time series) yaitu data dari tahun 1990-2020 di Provinsi Aceh.

Tabel 4.8
Hasil Regresi Linear Berganda

Dependent Variable: Y

Method: Least Squares

Date: 09/25/21 Time: 11:40

Sample: 1990 2020

Included observations: 31

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-73.55226	7.590718	-9.689763	0.0000
LOG (X ₁)	12.77677	1.136671	11.24052	0.0000
LOG (X ₂)	-0.054824	0.147525	-0.371625	0.7130
R-squared	0.852807	Mean dependent var		11.14564
Adjusted R-squared	0.842293	S.D. dependent var		0.806918
S.E. of regression	0.320446	Akaike info criterion		0.653557
Sum squared resid	2.875190	Schwarz criterion		0.792330
Log likelihood	-7.130133	Hannan-Quinn criter.		0.698793
F-statistic	81.11337	Durbin-Watson stat		0.357311
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Olahan Eviews (2021).

Hasil uji signifikansi parsial (Uji T) berdasarkan tabel 4.8 dapat ditulis persamaan regresi linear berganda yaitu sebagai berikut:

$$Y = -73.55226 + 12.77677X_1 - 0.054824X_2 + e \quad (4.1)$$

Berdasarkan model di atas bisa diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar -73.55226 menunjukkan bahwa jika variabel independent (Jumlah Penduduk dan Inflasi) adalah nol atau sama dengan konstan, maka penerimaan pajak daerah adalah sebesar 73.55226% .
2. Nilai Koefisien regresi variabel X_1 (Jumlah Penduduk) sebesar 12.77677 artinya apabila jumlah penduduk naik sebesar 1% maka penerimaan pajak akan meningkat sebesar 12.77677% dengan asumsi variabel lainnya adalah konstan.
3. Nilai koefisien regresi variabel X_2 (Inflasi) sebesar -0.054824 yang berarti setiap kenaikan inflasi 1% maka penerimaan pajak daerah akan mengalami penurunan sebesar 0.054824 dengan asumsi variabel lainnya adalah konstan.

4.5 Pengujian Hipotesis

4.5.1 Pengaruh Jumlah Penduduk dan Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Daerah Secara Parsial (Uji T)

Untuk mengetahui berapa besar pengaruh antar variabel secara parsial terhadap penerimaan pajak daerah maka digunakanlah uji t. uji t dilakukan untuk mengetahui kaitan variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Apabila nilai dari prob < 0,05 artinya adalah positif dimana adanya pengaruh dari variabel bebas secara sendirinya terhadap variabel terikat. Uji hipotesis yang dilakukan secara parsial dengan uji t bisa diperlihatkan pada tabel di bawah:

Tabel 4.9
Hasil Uji T

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-73.55226	7.590718	-9.689763	0.0000
LOG (X ₁)	12.77677	1.136671	11.24052	0.0000
LOG (X ₂)	-0.054824	0.147525	-0.371625	0.7130

Sumber: Olahan Eviews (2021).

Berdasarkan tabel 4.9 di atas, dapat dijelaskan yaitu:

- Pengaruh jumlah penduduk (X₁) terhadap penerimaan pajak daerah (Y).

Hasil uji t pada variabel jumlah penduduk mempunyai prob 0.0000 berarti < 0.05 yang artinya variabel jumlah penduduk (X₁) mempunyai pengaruh positif dan signifikan

terhadap penerimaan pajak daerah. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_a diterima.

- b. Pengaruh inflasi (X_2) terhadap penerimaan pajak daerah (Y).

Hasil uji t pada variabel inflasi (X_2) mempunyai pengaruh negatif tidak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Hal ini berarti H_0 diterima dan H_a ditolak.

4.5.2 Pengaruh Jumlah penduduk dan Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Secara Simultan (Uji F)

Pengujian dilakukan untuk membuktikan pengaruh secara simultan variabel bebas yaitu jumlah penduduk dan inflasi terhadap penerimaan pajak daerah. Dasar pengambilan keputusan yaitu apabila nilai prob $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima dan apabila nilai prob $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Uji hipotesis secara bersama sama terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.10
Hasil Uji F

R-squared	0.852807	Mean dependent var	11.14564
Adjusted R-squared	0.842293	S.D. dependent var	0.806918
S.E. of regression	0.320446	Akaike info criterion	0.653557
Sum squared resid	2.875190	Schwarz criterion	0.792330
Log likelihood	-7.130133	Hannan-Quinn criter.	0.698793
F-statistic	81.11337	Durbin-Watson stat	0.357311
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Olahan Eviews (2021).

Dengan Hipotesis:

H_0 : Jumlah penduduk dan inflasi secara bersama sama tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah di provinsi Aceh.

H_a : Jumlah penduduk dan inflasi secara bersama sama berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah di provinsi Aceh.

Berdasarkan pada hasil output Eviews di atas, menunjukkan hasil dari nilai uji F dalam Eviews yang diberi label F-Statistics. Pada penelitian ini nilai dari uji F sebesar 81.11337 dengan prob 0.000000 dimana $< 0,05$. Hal ini berarti H_a diterima di uji F. hal ini juga berarti secara serentak variabel independent (Jumlah penduduk dan Inflasi) mempunyai pengaruh terhadap variabel dependennya (penerimaan pajak daerah).

4.6 Koefisien Determinasi (R^2)

Uji ini dilakukan untuk dapat mengetahui berapa besar nilai dari pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) maka digunakanlah koefisien determinasi. Koefisien determinasi dinyatakan dalam bentuk persentase (%). Apabila nilai koefisien determinasi semakin mencapai angka nol maka akan semakin kecil pula pengaruh variabel bebas kepada variabel terikatnya. Apabila nilai koefisien mencapai angka 100% berarti pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikat semakin besar. Nilai dari koefisien determinasi bisa diperlihatkan pada tabel yang ada di bawah ini:

Tabel 4.11
Hasil Uji Koefesien Determinasi (R^2)

R-squared	0.852807	Mean dependent var	11.14564
Adjusted R-squared	0.842293	S.D. dependent var	0.806918
S.E. of regression	0.320446	Akaike info criterion	0.653557
Sum squared resid	2.875190	Schwarz criterion	0.792330
Log likelihood	-7.130133	Hannan-Quinn criter.	0.698793
F-statistic	81.11337	Durbin-Watson stat	0.357311
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Olahan Eviews (2021).

Berdasarkan tabel 4.11 di atas menunjukkan R-Square yaitu sebesar 0.852807. Berarti persentase pengaruh variabel bebas (jumlah penduduk dan inflasi) terhadap variabel terikatnya (penerimaan pajak daerah) yaitu 85.2%. hal ini berarti variabel independen yang ada dalam model mampu menjelaskan sebesar 85.2% terhadap variabel dependennya, dan sisanya senilai 14.8% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain yang berada di luar model regresi.

4.7 Pembahasan hasil Penelitian

4.7.1 Pengaruh Jumlah penduduk Terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Bertambahnya jumlah penduduk pada sebuah wilayah bisa mempengaruhi pajak yang akan diterima oleh daerah sebab seiring dengan jumlah penduduk yang bertambah di sebuah wilayah dapat membuat jumlah wajib pajak pada suatu daerah mengalami peningkatan sehingga nantinya pajak yang diterima daerah juga

mengalami peningkatan. Sebab adanya penambahan jumlah penduduk yang ada di suatu wilayah akan memberikan dampak terhadap pajak yang diterima daerah secara langsung (Saputra, Sudjana & Djudi, 2014).

Berdasarkan hasil output Eviews, memperlihatkan bahwa nilai prob yaitu 0.0000 yakni $< 0,05$ hal ini berarti jumlah penduduk mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi Aceh. Dengan dugaan sementara H_a yang diajukan bisa diterima. Bermakna apabila jumlah penduduk bertambah maka penerimaan pajak daerah juga mengalami peningkatan.

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sania, Yunita, & Muttaqin (2018) menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah. Penelitian yang dilaksanakan oleh Saputra (2018) menunjukkan bahwasanya jumlah penduduk mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Cilegon, dan penelitian yang dilaksanakan oleh Kadafi, Mersa & Putri (2020) juga menunjukkan bahwa jumlah penduduk mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kota samarinda.

Pada tahun 2020 jumlah penduduk di Provinsi Aceh meningkat sebesar 5.459.891 Jiwa dan pada tahun 2020 penerimaan pajak daerah juga meningkat sebesar

Rp1.477.991.066.970. dari tahun sebelumnya. Menurut Direktorat Jenderal Pajak dan Kemenkeu (2020) kebijakan yang telah dilakukan agar jumlah penduduk (wajib pajak) membayar pajak tepat waktu agar penerimaan bisa meningkat yaitu seperti mengirimkan pemberitahuan kepada masyarakat melalui email dan juga terus melakukan upaya sosialisasi seperti melalui media elektronik, maupun media sosial dan media cetak, serta upaya pemasangan spanduk di tempat yang strategis sebagai pengingat, dan strategi lain yang dilakukan seperti menggelar pekan panutan di seluruh kantor wilayah untuk tokoh ataupun *public figur* dan pejabat pemerintahan pusat maupun daerah. Selain itu pada kelas pajak juga dilakukan khususnya pengisian SPT Tahunan OP melalui online dan juga meningkatkan pelayanan secara online.

4.7.2 Pengaruh Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Berdasarkan hasil output Eviews diketahui bahwa nilai probabilitas $0.7130 > 0.05$, sehingga bisa disimpulkan bahwa inflasi mempunyai pengaruh yang negatif tidak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi Aceh. Sehingga dugaan sementara H_0 yang diajukan bisa diterima. Bermakna apabila laju inflasi tinggi maka penerimaan pajak daerah akan menurun.

Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis yang menyebutkan bahwasanya inflasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Karena menurut Prawironegoro (di kutip dalam Lumy, 2018) mengatakan bahwa ketika harga barang naik atau turun secara terus menerus, pengeluaran masyarakat akan

bertambah dikarenakan kondisi perekonomian yang berakibat buruk. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi tidak berpengaruh secara signifikan yang artinya ketika inflasi itu naik secara terus menerus, masyarakat akan tetap membayar pajak daerah dikarenakan pajak dapat bersifat memaksa, meskipun pendapatan mereka berkurang akibat kenaikan harga barang dan jasa sehingga ketika inflasi ini naik atau turun tidak berakibat pada penerimaan pajak daerah.

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilaksabakan oleh Sania, Yunita & Muttaqin (2018) yang menunjukkan inflasi tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian yang dilaksanakan oleh Nurrohman (2010) yang menunjukkan inflasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Surakarta tahun 1994-2007. Penelitian yang dilaksanakan oleh Saputra (2018) yang menunjukkan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Cilegon.

Menurut Bank Indonesia (2021) Inflasi di tahun 2020 alami kenaikan yaitu senilai 3,59%, hal ini lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 1.69 Peningkatan inflasi disebabkan oleh inflasi yang terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Pemerintah aceh telah berupaya mengendalikan inflasi seperti melakukan pemantauan stok dan produksi

komoditas bahan makanan, khususnya komoditas pertanian, perikanan, dan peternakan secara disiplin pada setiap bulannya dan juga melakukan upaya pencegahan adanya praktik penimbunan barang bahan pangan melalui kerja sama TPID dengan Satgas Pangan. Pada tahun 2020 pajak daerah juga alami kenaikan dibandingkan periode tahun lalu senilai Rp 1.409.251.915.061.00 naik pada tahun 2020 menjadi Rp1.477.991.066.970.00.



BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang sudah dilaksanakan pada semua data yang telah dikumpulkan bisa ditarik kesimpulan diantaranya yaitu:

1. Jumlah penduduk secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi Aceh dengan nilai signifikan sebesar $0,0000 < 0.05$ sehingga dapat disimpulkan apabila jumlah penduduk meningkat maka penerimaan pajak daerah juga akan meningkat.
2. Inflasi secara parsial berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi Aceh dengan nilai signifikan sebesar 0.7130 yang berarti > 0.05 sehingga dapat disimpulkan apabila inflasi meningkat maka penerimaan pajak daerah akan mengalami penurunan.
3. Pengujian secara simultan jumlah penduduk dan inflasi melalui uji f dengan nilai signifikan probabilitas sebesar $0.000000 < 0.05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk dan inflasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi Aceh.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah diuraikan di atas. Terdapat beberapa saran yang diharapkan bisa memberi masukan kepada penelitian selanjutnya maupun untuk pemerintah:

1. Pemerintah daerah diharapkan lebih memperhatikan jumlah penduduk karena merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah dan memajukan kesejahteraan penduduk dengan cara mengurangi angka pengangguran agar nantinya masyarakat dapat lebih produktif dalam hal membayar pajak.
2. Pemerintah daerah diharapkan mampu memperhatikan tingkat inflasi yang berlangsung sehingga nantinya bisa menekan tingkat inflasi serta diharapkan mampu mendorong penerimaan pajak daerah.
3. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan penelitian ini bisa menjadi panduan untuk penelitian yang akan datang terkait dengan judul ini dan dapat menambah rentang tahun dan variabel-variabel lain yang berkaitan dengan penerimaan pajak daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Yani. (2013). *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Pt.Raja Grafindo
- Aji, Firman Bayu, dan Nugroho SBM. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah kota semarang. *Jurnal of economic*. Volume 10, Nomor 1, tahun 2021.
- Ajie, Musliadi, Umar. (2008). *Pangantar Studi Kepustakaan*. Banda Aceh: PENA
- Arianto, Puspita Suci. (2014). “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Surabaya*”. JIRA Vol.3 No.1. 2014 hal 1-14.
- Bidarti, Agustina. (2020). *Teori Kependudukan*. Bogor: LINDAN Bestari.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. (2020). *Data jumlah penduduk Provinsi Aceh*. Aceh: Badan Pusat Statistik Aceh.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. (2020). *Data tingkat inflasi di Provinsi Aceh*. Aceh: Badan Pusat Statistik Aceh.
- Direktorat Jendral Pajak (DJP) dan Kemenkeu Indonesia. (2020). *Realisasi APBD Tahun*. Jakarta: Direktorat Jendral Pajak (DJP) dan Kemenkeu Indonesia.
- Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) (2021).
- Edi, Suprianto. (2011). *Perpajakan di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Ghozali, Imam. (2013). *Aplikasi Multivariate dengan program IBM SPSS 23*. Yogyakarta: Universitas Diponegoro.
- H.A.W. Widjaja. (2002). *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonomi*. Jakarta: Pt.Raja Grafindo Persada.

- Halim, Abdul, Icuk Rangga Bawono, dan Amin Dara. (2020). *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Study Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Muh Abdul. (2018). *Teori Ekonomi Makro*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Haniz, Nadya Fazriana. (2013). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kota Tegal. Skripsi. Universitas Diponegoro Semarang.
- Hartati, Neneng. (2015). *Pengantar Perpajakan*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Hasyim, Ali Ibrahim. (2016). *Ekonomi Makro*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Kadafi, Muhammad, Nyoria Anggraeni Mersa, dan Hanna Septiana Putri. (2020). Determinan penerimaan pendapatan penerimaan pajak daerah Kota samarinda. *Jurnal eksis*. Vol 16 No 1 April 2020.
- Karya, Detri, dan Syamri Syamsuddin. (2017). *Makro Ekonomi: Pengantar Untuk Manajemen*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kusuma, Krisna Arta Anggar dan Putu Wirawati. 2013. “Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapartan Asli Daerah Sekabupaten/Kota Di Provinsi Bali”. E-Journal Akuntansi 2302-8556 Vol.2 No.1 2013 hal 574-585.
- Lumy, Denny George, Paulus Kindangen, Daisy S.M. Engka. (2018). Analsiis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah pada pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal pembangunan ekonomi dan pembangunan daerah*. Vol.19 No.2 (2018).
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mankiw, G. 2006. *Makro Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan edisi terbaru 2016*. Yogyakarta: ANDI.

- Mulyadi. (2017). *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Naf'an. (2014). *Ekonomi Makro Tinjauan Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nurrohman, Alfian. (2010). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Surakarta (tahun 1994-2007)*. Skripsi. Program Sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Prasetyo, (2016), *Analisis pengaruh Jumlah Penduduk, Inflasi, dan Pdrb Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah (tahun 2011-2014)*. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro
- Prawoto, Nano, (2019). *Pengantar Ekonomi Makro*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Priyatno, Dwi. (2007). *Mandiri Belajar SPSS (Untuk Analisis Data dan Uji Statistik)*. Yogyakarta: Mediakom.
- Putri, Phany Ineke. (2013). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak. *Journal of economic and policy*, 6 (2) (2013): 103-213
- Rasyid, Razali. (2017). *Bunga Rampai Kependudukan kelahiran, Kematian, Migrasi dan Pembangunan Berwawasan Kependudukan*. Banda Aceh: Syiah Kuala Universitas Press Darussalam.
- Resmi, Siti. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat
- Resmi, Siti. (2016). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Said, R.(2012). *Pengantar Ilmu Kependudukan*. Jakarta: Lembaga Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan social.
- Sania, Hidayani, Eva Anggra Yunita, & Ibnu Muttaqin. (2018). Pengaruh jumlah penduduk, produk domestik regional bruto, dan inflasi terhadap penerimaan pajak daerah pada

Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa tengah. Vol. IX No. 2 Februari 2018.

- Saputra, Anatoly Aditya. (2018). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah di Kota cilegon. *Jurnal ekonomi*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Saputra, Andys Dwi, Nengah Sudjana dan Mochammad Djudi. (2014). “Analisis Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung)”. *Jurnal Perpajakan*, Vol. 3 No.1 Desember 2014 h 1-8.
- Saraswati, Mila, dan Ida Widanangsih, (2008). *Be Smart Ilmu Pengetahuan Sosial*. Bandung: Grafindo Media Pratama.
- Sari, Purnama Dian & Ilyas, Fitrawati. (2016). Analisis faktor faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah di Provinsi Bengkulu. *Jurnal Akuntansi*. Vol. 6, No.1, Februari 2016. Hal 75-84.
- Siahaan, Marihot Pahala. (2016). *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Silalahi, Remus, Syahri Effendi, Darwin Damanik dan Muhammad Fahmi. (2013). *Teori Ekonomi Makro*. Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- Simanjuntak, Tmbul Hamonangan, dan Imam Mukhlis. (2012). Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi. Jakarta: Raih Asa sukses.
- Sinaga, Parlindungan. (2011). Intensifikasi, Ekstensifikasi, dan Kesadaran masyarakat terhadap peningkatan Pajak Daerah di Kabupaten Mandailing Natal. *Skripsi*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Sudirman, Risnawati & Antong Amiruddin. (2015). *Perpajakan: Pendekatan Teori dan Praktik Indonesia*. Malang: Empatdua Media.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

- Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Paper Plane. Yogyakarta.
- Sukirno, Sadono. (2016). *Makro Ekonomi Modern*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suprianto, Edi. (2011). *Perpajakan di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Umar, H. (2014). *Metode Penelitian Untuk Skripsi & Tesis Bisnis* Edisi ke 2.
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
- Undang-Unddang No 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 taun 1993 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan Menjadi UndangUndang.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.33 Tahun 2004. Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.34 Tahun 2000. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan daerah.
- Utoyo, bambang, (2009). *Geografi Membuka cakrawala Dunia*. Jakarta: PT.Setia Purna Waluyo. (2019). *Perpajakn Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widodo, Widi. (2010). *Moralitas, Budaya dan kepatuhan Pajak*. Bandung: Alfabeta.

Lampiran 1

Data Jumlah Penduduk, Inflasi, dan Pajak Daerah tahun 1990-2020

No	Tahun	Jumlah Penduduk(Jiwa)	Inflasi (%)	Pajak daerah (Ribu)
1	1990	3.415.837	8,85	8.797.164.281,05
2	1991	3.469.770	6,87	9.952.002.954,50
3	1992	3.519.522	2,24	11.049.123.024,85
4	1993	3.604.758	9,83	5.447.247.291,52
5	1994	3.657.078	8,97	19.968.952.719,00
6	1995	3.862.800	9,16	24.492.023.327,00
7	1996	3.934.000	6,66	28.561.924.221,00
8	1997	4.004.600	9,90	29.650.000.000,00
9	1998	4.074.900	79,01	19.463.000.000,00
10	1999	4.110.100	4,98	19.411.000.000,00
11	2000	3.929.234	9,59	28.531.000.000,00
12	2001	4.114.000	14,03	43.355.000.000,00
13	2002	4.166.040	10,55	72.734.000.000,00
14	2003	4.218.486	4,03	86.900.000.000,00
15	2004	4.075.599	7,08	138.250.000.000,00
16	2005	4.031.589	34,88	177.472.000.000,00
17	2006	4.153.573	9,98	309.556.000.000,00
18	2007	4.223.833	9,41	362.835.000.000,00
19	2008	4.293.915	11,92	463.944.000.000,00
20	2009	4.363.477	3,72	462.151.772.869,00
21	2010	4.494.410	5,86	521.326.412.818,00
22	2011	4.597.308	3,43	586.181.445.846,00
23	2012	4.693.934	0,22	687.476.816.747,00
24	2013	4.791.924	7,31	752.846.745.436,00
25	2014	4.906.835	8,09	1.030.679.175.160,00
26	2015	5.001.953	1,53	1.172.685.149.787,00
27	2016	5.096.248	3,95	1.252.750.000.000,00
28	2017	5.189.466	4,25	1.315.393.896.060,00
29	2018	5.281.314	1,84	1.309.081.813.533,00

30	2019	5.371.532	1,69	1.409.251.915.061,00
31	2020	5.459.891	3,59	1.477.991.066.970,00

Lampiran 2

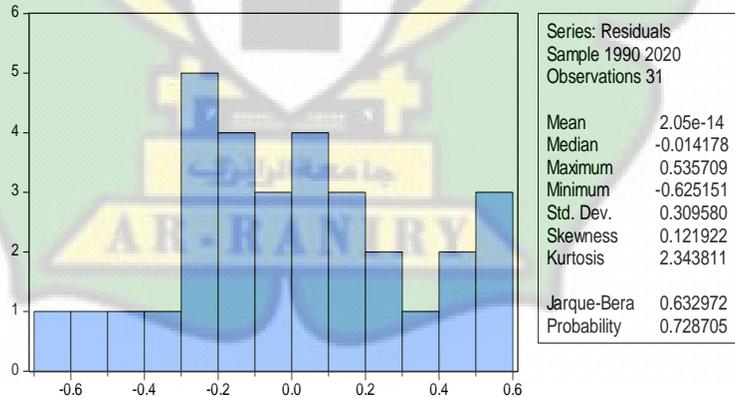
Data yang sudah di LOG

No	Tahun	Log Pajak Daerah	Log Inflasi	Log Pajak daerah
1	1990	6,533497138	0,946943271	9,944342702
2	1991	6,540300688	0,836956737	9,997910496
3	1992	6,546483684	0,350248018	10,04332781
4	1993	6,556876114	0,992553518	9,736177092
5	1994	6,563134223	0,952792443	10,30035529
6	1995	6,586902223	0,961895474	10,38902466
7	1996	6,594834356	0,823474229	10,45578746
8	1997	6,602559143	0,995635195	10,4720247
9	1998	6,610116955	1,897682062	10,28920978
10	1999	6,613852389	0,697229343	10,28804791
11	2000	6,594307893	0,981818607	10,45531699
12	2001	6,614264287	1,147057671	10,63703919
13	2002	6,619723435	1,02325246	10,86173747
14	2003	6,625156612	0,605305046	10,93901978
15	2004	6,610191447	0,850033258	11,14066514
16	2005	6,605476252	1,542576476	11,24912984
17	2006	6,618421848	0,999130541	11,49073923
18	2007	6,625706739	0,973589623	11,55970917
19	2008	6,632853443	1,076276255	11,66646556
20	2009	6,639832691	0,57054294	11,66478462

21	2010	6,652672688	0,767897616	11,71710973
22	2011	6,662503601	0,53529412	11,76803207
23	2012	6,671536979	0,657577319	11,83725806
24	2013	6,680509922	0,863917377	11,87670658
25	2014	6,690801454	0,907948522	12,0131235
26	2015	6,699139607	0,184691431	12,06918143
27	2016	6,707250554	0,596597096	12,09786441
28	2017	6,715122671	0,62838893	12,11905582
29	2018	6,722741989	0,264817823	12,11696679
30	2019	6,730098167	0,227886705	12,14898863
31	2020	6,737183973	0,555094449	12,16967181

Lampiran 3 Hasil Regresi Eviews

1. Uji Normalitas



2. Uji Multikolinearitas

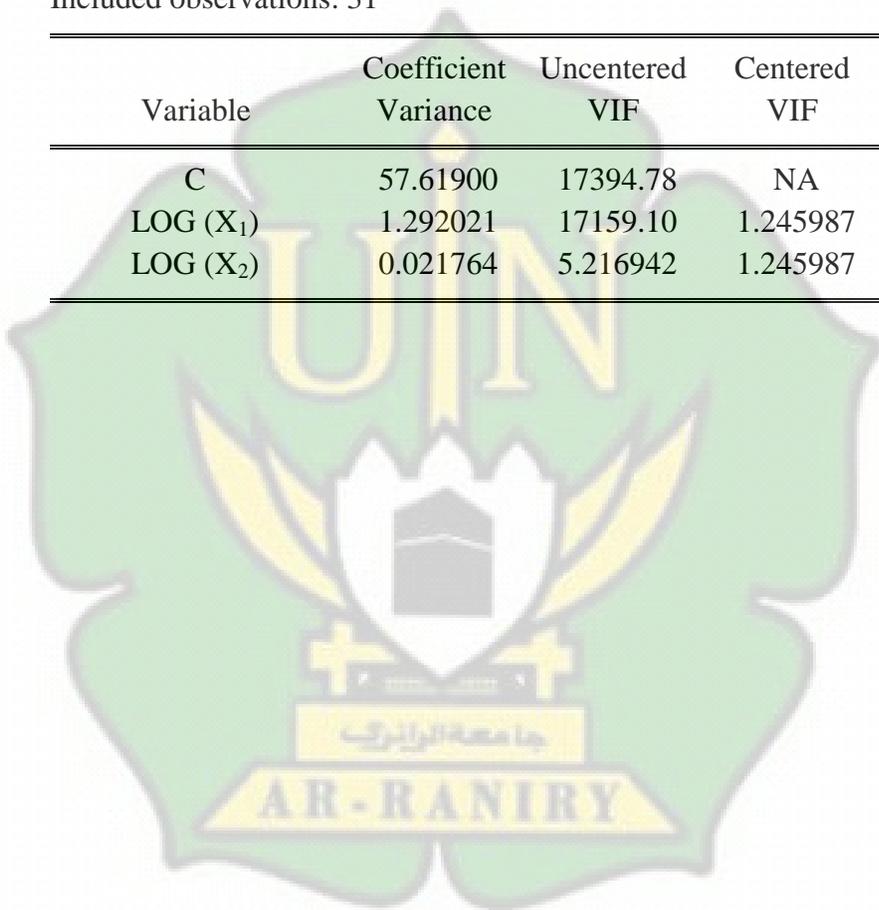
Variance Inflation Factors

Date: 09/25/21 Time: 11:41

Sample: 1990 2020

Included observations: 31

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	57.61900	17394.78	NA
LOG (X ₁)	1.292021	17159.10	1.245987
LOG (X ₂)	0.021764	5.216942	1.245987



3. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic	2.954565	Prob. F(2,28)	0.0685
Obs*R-squared	5.402174	Prob. Chi-Square(2)	0.0671
Scaled explained SS	2.961212	Prob. Chi-Square(2)	0.2275

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 09/25/21 Time: 11:43

Sample: 1990 2020

Included observations: 31

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.213308	2.435147	-0.498248	0.6222
LOG (X ₁)	0.183860	0.364651	0.504208	0.6181
LOG (X ₂)	0.111427	0.047327	2.354406	0.0258

R-squared	0.174264	Mean dependent var	0.092748
Adjusted R-squared	0.115283	S.D. dependent var	0.109293
S.E. of regression	0.102801	Akaike info criterion	-1.620281
Sum squared resid	0.295904	Schwarz criterion	-1.481508
Log likelihood	28.11436	Hannan-Quinn criter.	-1.575045
F-statistic	2.954565	Durbin-Watson stat	1.217618
Prob(F-statistic)	0.068514		

4. Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	0.154559	Prob. F(2,25)	0.8576
Obs*R-squared	0.366411	Prob. Chi-Square(2)	0.8326

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 09/25/21 Time: 11:46

Sample: 1991 2020

Included observations: 31

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.002526	0.036469	-0.069251	0.9453
D(X ₁)	0.412741	3.662788	0.112685	0.9112
D(X ₂)	-0.001763	0.049099	-0.035900	0.9716
RESID(-1)	-0.093685	0.214420	-0.436920	0.6659
RESID(-2)	-0.072669	0.202584	-0.358710	0.7228

R-squared	0.012214	Mean dependent var	1.67E-17
Adjusted R-squared	-0.145832	S.D. dependent var	0.136915
S.E. of regression	0.146559	Akaike info criterion	-0.851764
Sum squared resid	0.536990	Schwarz criterion	-0.618231
Log likelihood	17.77645	Hannan-Quinn criter.	-0.777054
F-statistic	0.077280	Durbin-Watson stat	2.013543
Prob(F-statistic)	0.988537		

5. Hasil Regresi Linear Berganda

Dependent Variable: Y

Method: Least Squares

Date: 09/25/21 Time: 11:40

Sample: 1990 2020

Included observations: 31

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-73.55226	7.590718	-9.689763	0.0000
LOG (X ₁)	12.77677	1.136671	11.24052	0.0000
LOG (X ₂)	-0.054824	0.147525	-0.371625	0.7130
R-squared	0.852807	Mean dependent var		11.14564
Adjusted R-squared	0.842293	S.D. dependent var		0.806918
S.E. of regression	0.320446	Akaike info criterion		0.653557
Sum squared resid	2.875190	Schwarz criterion		0.792330
Log likelihood	-7.130133	Hannan-Quinn criter.		0.698793
F-statistic	81.11337	Durbin-Watson stat		0.357311
Prob(F-statistic)	0.000000			

6. Uji Parsial (Uji t)

Dependent Variable: Y

Method: Least Squares

Date: 09/25/21 Time: 11:40

Sample: 1990 2020

Included observations: 31

Variable	Coefficien t	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-73.55226	7.590718	-9.689763	0.0000
LOG (X ₁)	12.77677	1.136671	11.24052	0.0000
LOG (X ₂)	-0.054824	0.147525	-0.371625	0.7130

7. Uji Simultan (Uji f)

R-squared	0.852807	Mean dependent var	11.14564
Adjusted R-squared	0.842293	S.D. dependent var	0.806918
S.E. of regression	0.320446	Akaike info criterion	0.653557
Sum squared resid	2.875190	Schwarz criterion	0.792330
Log likelihood	-7.130133	Hannan-Quinn criter.	0.698793
F-statistic	81.11337	Durbin-Watson stat	0.357311
Prob(F-statistic)	0.000000		

8. Hasil Uji Koefesien Determinasi (R^2)

R-squared	0.852807	Mean dependent var	11.14564
Adjusted R-squared	0.842293	S.D. dependent var	0.806918
S.E. of regression	0.320446	Akaike info criterion	0.653557
Sum squared resid	2.875190	Schwarz criterion	0.792330
Log likelihood	-7.130133	Hannan-Quinn criter.	0.698793
F-statistic	81.11337	Durbin-Watson stat	0.357311
Prob(F-statistic)	0.000000		
